



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**HUBUNGAN ANTARA PERUBAHAN NILAI-NILAI  
TERHADAP KELUARGA, ANAK, DAN PERNIKAHAN  
PASCAPERANG DUNIA II DENGAN PERUBAHAN PERSEPSI  
PEREMPUAN JEPANG TERHADAP PERCERAIAN DALAM  
MASYARAKAT JEPANG KONTEMPORER**

**SKRIPSI**

**SRI SETYO YOGAYANTI**

**0806354541**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI JEPANG**

**DEPOK**

**JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**HUBUNGAN ANTARA PERUBAHAN NILAI-NILAI  
TERHADAP KELUARGA, ANAK, DAN PERNIKAHAN  
PASCAPERANG DUNIA II DENGAN PERUBAHAN PERSEPSI  
PEREMPUAN JEPANG TERHADAP PERCERAIAN DALAM  
MASYARAKAT JEPANG KONTEMPORER**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Humaniora**

**SRI SETYO YOGAYANTI**

**0806354541**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI JEPANG**

**DEPOK**


**JULI 2012**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika pada kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Jakarta, 04 Juli 2012**




**Sri Setyo Yogayanti**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sri Setyo Yogayanti

NPM : 0806354541

Tanda Tangan : 

Tanggal : 4 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Sri Setyo Yogayanti  
NPM : 0806354541  
Program Studi : Jepang  
Judul Skripsi : Hubungan antara Perubahan Nilai-nilai terhadap Keluarga, Anak, dan Pernikahan Pasca Perang Dunia II dengan Perubahan Persepsi Perempuan Jepang terhadap Perceraian dalam Masyarakat Jepang Kontemporer

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Sri Ayu Wulansari, S.S., M.Si

( Sri Ayu Wulansari )

Ketua Sidang: Bachtiar Alam, S.S., M.Si, Ph.D

( Bachtiar Alam )

Penguji : Darsimah Mandah, M.A

( Darsimah Mandah )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Juli 2012

Oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 19651023 1990031 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang berlimpah serta kesehatan yang telah diberikanselamapembuatanskripsiinihinggadapatselesaitepatwaktu.
2. Sri Ayu Wulansari, S.S,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Jonnie Rasmada Hutabarat, M.A. selaku Ketua Program Studi Jepang yang telah mendukung dan memberi arahan selama saya menjalani perkuliahan.
4. Bachtiar Alam, S.S., M.Si, Ph.D. selaku ketua sidang yang telah memberikan banyak masukan yang berguna bagi penulisan skripsi ini.
5. Ibu Darsimah Mandah, M.A. selaku dosen penguji yang telah bersedia menjadi pembaca dan banyak memberi masukan terhadap skripsi ini dan juga perhatian serta nasehat yang selalu beliau berikan selama ini supaya saya dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.
6. Dr. Siti Darsiah Anwar, S.S. selaku pembimbing akademik yang selalu membimbing dan membantu saya disaat mengalami masalah dengan pengisian mata kuliah.
7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Jepang yang telah banyak memberikan wawasan yang sangat berharga kepada saya.

8. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian serta doa yang tiada henti tercurah untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi sampai saat ini. Anti sayang Papa Mama.
9. Kakak-kakak saya tercinta, Mas Gun, Mas Iwan, Ayong, Abe, Kak Dewa yang telah banyak memberikan doa dan dukungan selama ini.
10. Seluruh keluarga besar saya (mbah, uwa, tante, om, sepupu, dan keponakan) yang juga telah banyak memberikan doa serta dukungan sampai saat ini.
11. Ichu yang selama ini selalu menjadi sahabat yang setia menemani dari awal kuliah sampai saat ini, Ode yang juga selalu mendampingi khususnya pada saat pembuatan skripsi ini dimana senang dan duka kita rasakan bersama, Fatia yang juga selalu mendukung dan menyemangati, Ami yang juga banyak membantu dari mulai ke JF sampai diperbolehkan menginap di rumah Uwo (terima kasih atas doanya Uwo). Semoga persahabatan kita berlima bisa terus berlanjut ya. Terima kasih atas semua waktu yang kita lewatkan bersama dan kenangan-kenangan indah yang tidak akan terlupakan selama 4 tahun ini. Love you guys.
12. Para sahabat masyarakat, Asri yang selalu bersama selama pembuatan skripsi ini dan juga turut merasakan suka dan duka bersama, Ros, Siska, Sherlina, Nares, Karin, Jeha, dan Didib.
13. Teman-teman Sastra Jepang 2008, Ovvvy yang membantu dalam mempercantik skripsi ini, Intan yang selalu menemani berkeluh kesah di *chat*, Cede yang selalu menyemangati, Ichi yang juga selalu bersemangat, Ryan yang membantu menerjemahkan, Gina yang bersedia memberikan tempat penginapan, Aya yang selalu bersedia ditebengin, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang juga selalu mendukung dan berjuang bersama. Terima kasih atas semua kenangan yang tak terlupakan dan keceriaan yang senantiasa mewarnai hari-hari kita.
14. Anggota keluarga besar HIMAJA. Puput 06, Aji 06, Himi 04, Andi 05, Kaia 07, Risa 07 dan *senpaitachi* yang telah memberikan banyak arahan, saran, bantuan dan dukungan kepada saya. *Kohaitachi* yang telah memberikan bantuan dan dukungannya selama ini.

15. Icha, Dewi, Cipu, Wita, Etonk, Ririn, Lucky, dan Mel yang sangat pengertian karena selama pembuatan skripsi ini sering kali saya tidak dapat ikut berkumpul dengan kalian. Terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat mendukung dan selalu ada sampai saat ini.

16. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi yang membaca.

Depok, 4 Juli 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Setyo Yogayanti  
NPM : 0806354541  
Program Studi : Jepang  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Hubungan antara Perubahan Nilai-nilai terhadap Keluarga, Anak, dan  
Pernikahan PascaPerang Dunia ke II dengan Perubahan Persepsi  
Perempuan Jepang terhadap Perceraian dalam Masyarakat Jepang  
Kontemporer**

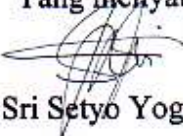
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 4 Juli 2012

Yang menyatakan

  
( Sri Setyo Yogayanti )

## **ABSTRAK**

Nama : Sri Setyo Yogayanti  
Program Studi : Jepang  
Judul : Hubungan antara perubahan nilai-nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan Pasca Perang Dunia ke II dengan perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian dalam masyarakat Jepang kontemporer

Skripsi ini membahas perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian dalam masyarakat kontemporer. Dengan mengambil studi kasus perempuan Jepang yang bercerai, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur keluarga menyebabkan perubahan nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan yang pada akhirnya menyebabkan perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian. Penelitian ini adalah menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan penelitian “case study”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian mengalami perubahan. Perempuan tidak lagi memandang perceraian sebagai suatu hal yang tidak biasa, melainkan sebagai suatu hal yang wajar. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih toleran terhadap perceraian.

Kata kunci: persepsi, perempuan Jepang, perceraian, struktur keluarga, nilai keluarga, nilai anak, nilai pernikahan.

## **ABSTRACT**

Name : Sri Setyo Yogayanti  
Study Program : Japanese  
Title : Relationship between changing values of family, children, and marriage after World War II with changing perception about divorce among Japanese women in contemporary Japanese society

The focus of this study is the changes in Japanese women’s perception of divorce in contemporary society. Taking the study case of divorced women, the purpose of this study is to know how the changes in family structure lead to changes of value towards family, kids, and marriage which in the end cause changes in Japanese women’s perception of divorce. The result of this study shows that women are no longer seeing divorcement as something unusual, but instead as something usual. In addition, the society also becomes more tolerant towards divorcement.

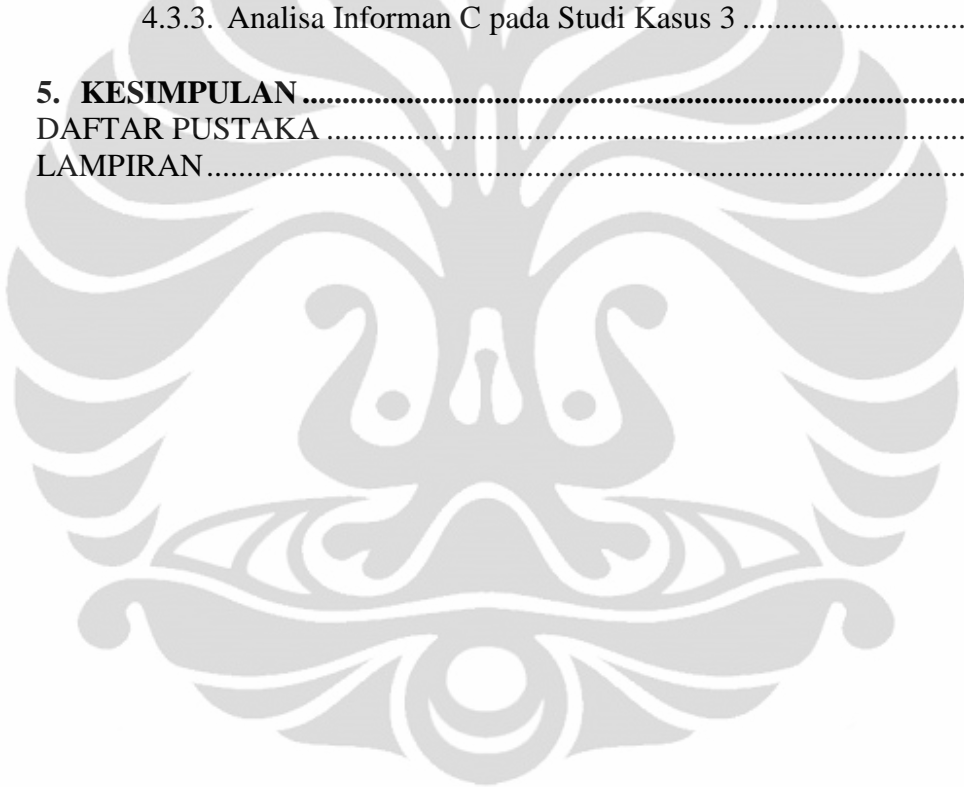
Key words: perception, Japanese women, divorcement, family structure, changes of value, family value, kid value, marriage value.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Masalah Penelitian .....	6
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Teori .....	6
1.5. Batasan Penelitian.....	8
1.6. Tujuan Penelitian .....	8
1.7. Sistematika Penulisan .....	8
1.8. Metodologi Penulisan .....	9
<b>2. PERUBAHAN STRUKTUR KELUARGA JEPANG DAN NILAI-NILAI TERHADAP KELUARGA, ANAK, DAN PERNIKAHAN SESUDAH PERANG DUNIA II.....</b>	<b>10</b>
2.1. Struktur Keluarga Jepang Sebelum Perang Dunia II.....	10
2.2. Nilai-nilai terhadap Keluarga, Anak, dan Pernikahan sebelum PD II.....	11
2.2.1. Nilai-nilai terhadap Keluarga.....	11
2.2.2. Nilai-nilai terhadap Anak.....	12
2.2.3. Nilai-nilai terhadap Pernikahan.....	12
2.3. Struktur Keluarga Jepang Sesudah Perang Dunia II.....	13
2.4. Nilai-nilai terhadap Keluarga, Anak, Pernikahan Setelah PD II .....	18
2.4.1. Nilai-nilai terhadap Keluarga.....	18
2.4.2. Nilai-nilai terhadap Anak.....	19
2.4.3. Nilai-nilai terhadap Pernikahan.....	20
<b>3. PERCERAIAN SEBELUM DAN SESUDAH PERANG DUNIA II DAN PERUBAHAN PERSEPSI PEREMPUAN JEPANG TERHADAP PERCERAIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1. Perceraian di Jepang .....	24
3.1.1. Jenis Perceraian di Jepang.....	24
3.1.2. Angka Perceraian di Jepang Sebelum dan Sesudah PD II.....	25
3.2. Perceraian Sebelum Perang Dunia II.....	26
3.3. Perceraian Sesudah Perang Dunia II .....	31
3.4. Persepsi Perempuan Jepang Terhadap Perceraian .....	34
3.4.1. Persepsi Perempuan Jepang terhadap Perceraian sebelum Perang Dunia II .....	34

3.4.2. Persepsi Perempuan Jepang terhadap Perceraian sesudah Perang Dunia II .....	36
--	----

<b>4. ANALISA PERSEPSI PEREMPUAN JEPANG TERHADAP PER-CERAIAN .....</b>	<b>41</b>
4.1. Studi Kasus pada Tiga Informan Perempuan Jepang.....	41
4.1.1. Studi Kasus pada Informan A .....	41
4.1.2. Studi Kasus pada Informan B.....	43
4.1.3. Studi Kasus pada Informan C.....	46
4.2. Teori Struktural Fungsional Durkheim .....	48
4.3. Analisa Studi Kasus Berdasarkan Teori Durkheim.....	50
4.3.1. Analisa Informan A pada Studi Kasus 1 .....	50
4.3.2. Analisa Informan B pada Studi Kasus 2 .....	50
4.3.3. Analisa Informan C pada Studi Kasus 3 .....	51
<b>5. KESIMPULAN .....</b>	<b>56</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	58
LAMPIRAN.....	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rasio Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Gambar 2.2	Struktur Keluarga Jepang Tahun 1920 dan 2002.....	18
Gambar 2.3	Tingkat Renai Kekkon dan Miai Kekkon Tahun 1930-2000.....	20
Gambar 2.4	Rata-rata Usia Pernikahan Pertama Laki-laki dan Perempuan dan Persentase Pernikahan Pertama Pengantin Laki-laki dan Perempuan Tahun 1910-2002.....	22
Gambar 3.1	Tingkat Perceraian per 1,000 Populasi Tahun 1889-2002.....	26
Gambar 3.2	Tingkat Perceraian per 1,000 Populasi di Negara Maju Tahun 1947-2001 .....	33
Gambar 3.3	Survey ke-10 Mengenai Pernikahan dan Kelahiran Tahun 1992-2002 .....	37
Gambar 3.4	Persepsi Perempuan Jepang terhadap Perceraian Tahun 1982....	38
Gambar 3.5	Persepsi Perempuan Jepang terhadap Perceraian Tahun 2002....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Perceraian Berdasarkan Jenisnya Tahun 1883-2006 .....	
--------------	---	--

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Modernisasi dan industrialisasi membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek ekonomi, politik, bahkan sosial. Begitu pula halnya dengan masyarakat Jepang. Ketika modernisasi dan industrialisasi terjadi di Jepang sejak Restorasi Meiji di tahun 1868, masyarakat Jepang banyak menyerap pengaruh barat, seperti dalam hal teknologi. Di satu sisi, dengan berkembangnya modernisasi dan industrialisasi, banyak kemajuan yang terjadi di Jepang, akan tetapi di sisi lain, hal tersebut justru memicu perubahan yang signifikan, seperti perubahan struktur keluarga dan meningkatnya angka perceraian.

Sebelum Restorasi Meiji terjadi, tepatnya pada Zaman Edo (1600-1868), struktur keluarga tradisional Jepang yang didasari oleh sistem *Ie* sudah terbentuk, khususnya di antara kelas bangsawan dan *samurai*. Sistem ini berperan penting dalam menyokong dan memperkuat struktur hierarki yang kaku dalam masyarakat feodal pada saat itu.

Namun, hampir 30 tahun setelah Restorasi Meiji, Pemerintah Meiji mengeluarkan hukum perdata yang berpijak pada sistem *Ie* pada tahun 1896, yang dikenal dengan nama めいじみんぽう 明治民法 *Meiji Minpou* (UU Sipil Meiji). Hukum perdata dengan sistem *Ie* yang sebelumnya hanya berlaku di antara kelas bangsawan dan samurai ini kemudian diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Jepang

Secara harafiah, *Ie* berarti rumah atau keluarga (*house, home, atau family*), tetapi sebenarnya *Ie* merepresentasikan sebuah unit kekerabatan dengan seorang kepala keluarga yang kekuasaannya diwariskan secara turun-menurun menurut garis patrilineal. Dalam setiap *Ie* terdapat satu pemimpin yang menjadi kepala keluarga, biasanya anak laki-laki pertama. Anak laki-laki pertama yang kelak akan menjadi pemimpin keluarga atau dikenal dengan istilah *kachou* (家長) biasanya mewarisi sebagian besar properti, kekayaan, keistimewaan dan yang paling penting kepemimpinan *Ie*.

Dengan demikian, melalui sistem *Ie*, kepala keluarga diharapkan untuk mempertahankan keberlangsungan *Ie*, melestarikan nama keluarga atau *myouji* (名字), kesinambungan harta keluarga, dan pemujaan terhadap leluhur.

Sistem *Ie* tersebut di atas, umumnya diterapkan pada struktur keluarga luas (*extended family*) atau yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah *chokkei kazoku* (直系家族). *Chokkei kazoku* menjadi struktur keluarga yang paling dominan pada Zaman Meiji. Struktur keluarga ini biasanya terdiri dari tiga generasi, kakek-nenek, ayah-ibu, dan anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi pewaris dan kepala keluarga dalam *chokkei kazoku* umumnya adalah anak laki-laki pertama. Terkadang jika tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus, maka akan dilakukan adopsi, yaitu mengambil anak laki-laki dari keluarga lain untuk kemudian dijadikan sebagai penerus keluarga untuk mempertahankan kesinambungan *Ie* tersebut. Dengan demikian, *chokkei kazoku* dengan sistem *Ie* itu sendiri memiliki arti lebih dari sekedar keluarga yang berdasarkan ikatan darah. Smith (2000) menjelaskan, “Meskipun perekrutan masuk ke dalam keluarga mulanya berdasarkan kelahiran dan pernikahan, keanggotaan dalam keluarga ditentukan bukan berdasarkan darah, tetapi oleh tempat tinggal dan partisipasi dalam kerja *Ie*” (hal. 308) dan “*Ie* yang terbentuk, diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya” (hal. 307).

Sehubungan dengan diberlakukannya sistem *Ie* melalui *Meiji Minpou* ke seluruh lapisan masyarakat, terbentuklah seperangkat nilai-nilai yang mengatur perikehidupan masyarakat Jepang pada saat itu. Khususnya dalam *chokkei kazoku*, ada tiga nilai penting yang harus dicermati yaitu, nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan. Dalam konteks nilai keluarga, setiap anggota sebuah *Ie* wajib menjaga keberlangsungan *Ie* tersebut.

Dalam konteks nilai anak, anak memiliki nilai sangat penting, khususnya anak laki-laki, karena anak laki-lakilah yang kelak akan melanjutkan keberadaan *Ie* tersebut. Anak juga dianggap bernilai produktif. Keberadaan seorang anak juga menjadi hal yang sangat penting bagi posisi seorang istri dalam suatu keluarga. Karena jika dalam tiga tahun seorang istri tidak memiliki anak, maka istri tersebut

harus pergi meninggalkan rumah, yaitu yang dikenal dengan istilah “*3-nen ko-naki ha sare*” (三年子なきは去れ).<sup>1</sup>

Dalam konteks nilai pernikahan, pernikahan menjadi suatu hal yang diharapkan bagi seluruh perempuan Jepang. Pernikahan bahkan dianggap sebagai kebahagiaan utama bagi seorang perempuan. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai dasar dari “stabilitas ekonomi”. Pernikahan menjadi suatu hal yang melibatkan dan memerlukan persetujuan keluarga. Pernikahan yang diatur dikenal dengan istilah *miai kekkon* (見合い結婚) menjadi hal yang biasa di antara masyarakat Jepang pada saat itu.<sup>2</sup>

Pada awal Zaman Meiji, di mana Jepang belum memasuki masa industrialisasi secara penuh, perceraian justru merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya di antara kelas petani. Prosedur yang harus ditempuh pun tidaklah sulit.<sup>3</sup> Hal ini ditunjukkan dengan tingkat perceraian yang relatif tinggi yaitu 40% per 1,000 populasi<sup>4</sup>, dan angka perceraian pada tahun 1883 mencapai 3.38 per 1,000 populasi.<sup>5</sup>

Setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1946, *Meiji Minpou* dihapus dan pada tahun 1947 diberlakukan Konstitusi baru yang dibuat berdasarkan prinsip demokrasi dan individualisme<sup>6</sup>, dan dikenal dengan istilah *Nihon Koku Kenpou* (日本国憲法). Prinsip demokrasi dan individualisme diartikan dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, perlindungan dari diskriminasi, dan kesetaraan jender menjadi hal yang utama Motonobu (2004).

Motonobu (2004) menyatakan dihapuskannya *Meiji Minpou*, dibuatnya Konstitusi baru yang menghapuskan sistem *Ie*, perubahan masyarakat agraris menjadi industrialis, terjadinya urbanisasi, terbukanya kesempatan untuk

<sup>1</sup> Satomi Kurosu, “Divorce in Early Modern Rural Japan: Household and Individual Life Course in Northeastern Villages, 1716-1870,” *Journal of Family History*, (June, 2011), 124

<sup>2</sup> Yoshio Sugimoto, *An Introduction to Japanese Society* (UK, 2003), 172

<sup>3</sup> Kurosu, *loc. cit.*, 118

<sup>4</sup> Meskipun tingkat perceraian di antara kelas petani relatif tinggi, tingkat perceraian di antara kelas bangsawan cenderung rendah. Pada tahun 1883, angka perceraian di Jepang mencapai 3,39 per 1000 populasi. Tingkat perceraian di kalangan bangsawan dan samurai mencapai 7-19% per 1,000 populasi. Satomi Kurosu.

<sup>5</sup> Meskipun tercatat pula bahwa pada tahun 1938 angka perceraian mencapai titik terendah yaitu, 0.63 per 1,000 populasi. Penurunan tingkat perceraian ini disebabkan antara lain oleh diberlakukannya Sistem *Ie* dalam *Meiji Minpou* seperti yang akan dijelaskan secara detail dalam Bab 3

<sup>6</sup> Motonobu, *loc. cit.*, 31



mengenyam pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya perempuan, menurunnya tingkat kelahiran, dan berakhirnya PD II, menyebabkan struktur keluarga Jepang berubah dari *chokkei kazoku* menjadi *kaku kazoku* (核家族) atau yang dikenal dengan istilah keluarga batih. Berbeda dengan *chokkei kazoku* yang terdiri dari tiga generasi, berdasarkan definisi George P. Murdock, *kaku kazoku* diartikan sebagai keluarga yang terdiri dari dua generasi yaitu ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Jumlah keluarga batih ini terus mengalami peningkatan yang pesat sesudah perang. Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa dalam struktur keluarga ini, jumlah anggota keluarga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan *chokkei kazoku*. Sebagai ilustrasi, sebagian besar keluarga hanya memiliki satu sampai dua anak, sehingga rata-rata jumlah anak dalam keluarga hanya mencapai 1.8.

Suatu hal yang sangat menarik adalah bahwa sejak terjadinya perubahan struktur keluarga sesudah PD II, tepatnya tahun 1960-an, perceraian mengalami peningkatan yang signifikan. Angka perceraian mencapai titik baliknya yaitu, 0.73 per 1,000 populasi pada tahun 1963 dan mencapai puncaknya di tahun 1980-an. Sejak saat itu angka perceraian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2002 mencapai angka 2.30 per 1,000 populasi. Menurut Sugimoto (2003), kebanyakan dari kasus perceraian sejak tahun 1980-an melibatkan pasangan yang baru menikah kurang dari dua tahun maupun pasangan yang menikah lebih dari dua puluh tahun. Kemudian sebagian besar dari perceraian tersebut merupakan perceraian yang didasari atas keputusan bersama.<sup>7</sup>

Motonobu (2004) berargumentasi bahwa perubahan struktur keluarga merupakan kunci penting terhadap peningkatan angka perceraian.<sup>8</sup> Lebih jauh Motonobu menyatakan bahwa peningkatan angka perceraian disebabkan oleh penurunan nilai-nilai tradisional dan munculnya nilai-nilai baru yang dipicu oleh perubahan struktur keluarga sesudah PD II. Secara khusus Motonobu menyatakan bahwa munculnya nilai-nilai baru ini mengarah pada perubahan pandangan mengenai pembentukan suatu keluarga. Disinilah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat, khususnya perubahan nilai keluarga dari *family oriented* menjadi

---

<sup>7</sup> Sugimoto, *op., cit.*, 160

<sup>8</sup> Motonobu, *loc., cit.*, 46

*individualistic oriented*; perubahan nilai anak dari yang sebelumnya dianggap bernilai produktif berubah menjadi bernilai konsumtif; perubahan nilai pernikahan, di mana apabila sebelumnya banyak pernikahan yang diatur oleh orangtua (*miai kekkon*), maka setelah PD II, banyak pasangan yang memilih untuk menikah berdasarkan cinta atau dikenal dengan istilah *renai kekkon* (恋愛結婚). Perubahan dari *miai kekkon* menjadi *renai kekkon* juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan angka perceraian di Jepang.

Motonobu (2004) lebih jauh menegaskan bahwa pada gilirannya, perubahan ketiga nilai tersebut turut mempengaruhi perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian sesudah PD II.<sup>9</sup> Perceraian yang pada Zaman Meiji dianggap sebagai suatu hal yang tidak biasa dan selalu melibatkan keluarga, sesudah PD II tidak lagi dilihat sebagai suatu tindakan yang melibatkan keluarga, melainkan berdasarkan keputusan masing-masing pribadi. Perempuan Jepang pada saat ini memandang perceraian ke arah yang lebih positif jika dibandingkan dengan masa sebelum PD II.<sup>10</sup> Perempuan memandang perceraian sebagai suatu pilihan yang dianggap berani dan patut dihormati. Selain itu, perceraian juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk dapat menggapai impian yang tertunda karena menikah. Sebaliknya, laki-laki melihatnya sebagai sebuah kegagalan dan ketidakbahagiaan.<sup>11</sup>

Berpijak pada tesis Motonobu (2004), studi ini berargumentasi bahwa peningkatan angka perceraian sesudah PD II memiliki hubungan yang erat dengan perubahan struktur keluarga. Perubahan struktur keluarga sesudah PD II kemudian memicu perubahan terhadap nilai keluarga, anak, dan pernikahan. Perubahan nilai-nilai tersebut pada gilirannya menyebabkan perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian.<sup>12</sup> Perubahan struktur keluarga dan nilai-nilai tersebut yang menurut Durkheim menyebabkan penurunan fungsi integratif keluarga yang pada gilirannya menyebabkan berbagai dampak sosial, di antaranya adalah tingginya tingkat perceraian di Jepang.

<sup>9</sup> Untuk selanjutnya dalam studi ini konsep yang akan digunakan adalah persepsi terhadap perceraian

<sup>10</sup> Sugimoto, *op. cit.*, 171

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Leon Festinger menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang membentuk persepsi, salah satunya adalah nilai-nilai yang dianut. Persepsi sendiri diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian atau interpretasi dari suatu stimulus yang diterima individu.

## 1.2 Masalah Penelitian

Masalah penelitian dalam studi ini adalah bagaimana perubahan struktur keluarga dan nilai-nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan sesudah Perang Dunia II menyebabkan perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian yang pada akhirnya mempengaruhi tingginya tingkat perceraian dalam masyarakat Jepang kontemporer.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana perubahan struktur keluarga Jepang pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II?
- b. Bagaimana perubahan nilai-nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II?
- c. Bagaimana perubahan struktur keluarga dan nilai-nilai tersebut menyebabkan perubahan persepsi perempuan Jepang setelah Perang Dunia II?

## 1.4 Kerangka Teori

Studi ini akan menggunakan teori struktural fungsional Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat merupakan sistem yang cerdas, yang dapat mengatur kebutuhannya sendiri, dan membuat perubahan agar tetap seimbang. Kebutuhan dari sistem itu sendiri yang membawa perubahan. Pada saat terjadi perubahan dalam masyarakat, seperti halnya industrialisasi ataupun pertumbuhan populasi yang cepat, maka aspek-aspek sosial atau sistem dalam masyarakat akan turut berubah untuk mempertahankan fungsinya serta menjaga keseimbangan. Sebagai contoh, yaitu sistem dalam masyarakat salah satunya struktur keluarga.

Ketika perubahan ini terjadi, terbentuk sistem yang mendukung perubahan tersebut dan juga sistem yang justru tidak dapat mendukung perubahan tersebut. Sistem yang mendukung akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sedangkan sistem yang tidak mendukung mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi itu sendiri. Penurunan fungsi yang terjadi pada sistem ini mengakibatkan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan fungsinya dan tercerai-berai. Pada gilirannya penurunan fungsi ini akan menyebabkan dampak sosial.

Dalam konteks masyarakat Jepang, industrialisasi dan modernisasi yang terjadi sejak Zaman Meiji dan kemajuan ekonomi setelah Perang Dunia II membawa banyak perubahan dalam masyarakat Jepang, salah satunya yaitu pada struktur keluarga Jepang. Jepang yang pada Zaman Meiji sangat kental dengan ideologi *Ie* dalam sistem keluarganya dan dikenal dengan istilah *chokkei kazoku* atau keluarga dimana tiga generasi hidup bersama di bawah satu atap, setelah Perang Dunia II berubah menjadi *kaku kazoku* atau keluarga batih. Terjadinya perubahan ini disebabkan sistem keluarga (*chokkei kazoku*) yang ada pada masyarakat saat itu dianggap sudah tidak dapat menunjang segala perubahan yang terjadi, sehingga masyarakat membutuhkan sistem yang dianggap lebih sesuai (*kaku kazoku*) dengan perubahan tersebut.

Talcott Parsons menyatakan bahwa industrialisasi mengubah sistem sosial dan juga hubungan kekerabatan. Keluarga menjadi lebih spesifik dan anggota keluarga menjadi pencari nafkah. Menurut Parsons, struktur keluarga batih dianggap lebih sesuai dengan keadaan masyarakat selama industrialisasi. Keluarga batih dianggap memiliki mobilitas yang tinggi dibandingkan dengan keluarga luas. Kemampuan masing-masing individu yang memiliki spesialisasi pada bidang-bidang tertentu sangat sesuai dengan masa industrialisasi dimana setiap individu dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi. Keluarga batih juga lebih cocok dengan prinsip merokrasi (hubungan yang lebih sedikit dengan keluarga). Struktur keluarga ini dianggap sangat efektif bila dibandingkan dengan struktur keluarga pada pra-industrialisasi.

Akan tetapi perubahan yang terjadi dalam struktur keluarga Jepang yang sebelumnya *chokkei kazoku* menjadi *kaku kazoku* ini menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai, seperti nilai terhadap keluarga, anak, pernikahan, dan perceraian. Kemudian nilai-nilai ini menyebabkan perubahan persepsi masyarakat, khususnya perempuan, terhadap perceraian, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat perceraian di Jepang. Dalam studi ini penurunan fungsi integratif keluarga yang pada gilirannya menyebabkan tingginya tingkat perceraian di Jepang setelah PD II.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Subjek penelitian dalam skripsi ini hanya akan dibatasi pada perempuan Jepang yang berusia 21-60 tahun, dengan status pernikahan baik menikah maupun tidak menikah, dan mencakup perempuan Jepang yang bekerja maupun yang berstatus ibu rumah tangga.

### **1.6 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam mengenai persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian yang dikaitkan dengan perubahan struktur keluarga Jepang setelah Perang Dunia II dan perubahan nilai-nilai yang menyertainya.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai sasaran dari tujuan penulisan skripsi ini, sistematika yang dipakai adalah sebagai berikut: BAB 1 berisi penjelasan mengenai latar belakang, penjabaran pokok permasalahan, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, penguraian sistematika penelitian, dan metodologi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya di BAB 2 dijelaskan mengenai perubahan struktur keluarga Jepang serta perubahan nilai-nilai, seperti nilai keluarga, anak, orangtua, dan pernikahan pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II.

Kemudian BAB 3 berisi penjelasan mengenai persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II yang akan diawali dengan pembahasan mengenai perceraian pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II, serta persepsi perempuan Jepang itu sendiri dalam memandang sebuah perceraian pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II.

Selanjutnya BAB 4 berisi analisa mengenai perubahan struktur keluarga dan nilai-nilai yang menyebabkan perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian melalui studi kasus. Lalu yang terakhir, BAB 5 berisi kesimpulan dari skripsi ini.

## 1.8 Metodologi Penulisan

Metodologi penelitian dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian “case study”. Selain itu, pendekatan ini juga didukung oleh metode penelaahan kepustakaan, yakni mengkaji dan menganalisa permasalahan melalui bantuan buku referensi dari berbagai sumber. Referensi yang menjadi acuan untuk penulisan skripsi ini didapat dari Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Studi Jepang, Perpustakaan Pusat Kebudayaan Jepang *The Japan Foundation*, buku-buku koleksi Wulan *Sensei* dan internet.



**BAB 2**  
**PERUBAHAN STRUKTUR KELUARGA JEPANG DAN NILAI-NILAI**  
**TERHADAP KELUARGA, ANAK, DAN PERNIKAHAN**  
**SESUDAH PERANG DUNIA II**

**2.1. Struktur Keluarga Jepang Sebelum Perang Dunia II**

Menurut Marfording, masyarakat Jepang “dianggap” sebagai masyarakat yang “homogen”<sup>13</sup>, dikategorikan oleh hierarki sosial dan memiliki orientasi kelompok yang kuat, yang mana nilai-nilai ditempatkan dalam harmoni, konsensus, dan loyalitas terhadap kelompok yang terdapat dalam sistem *Ie*.<sup>14</sup> *Shogun Tokugawa* di Zaman Edo (1600-1868) memerintah dengan mengikuti nilai-nilai tersebut. Pada Zaman Edo ini, sistem *Ie* hanya berlaku secara ketat di antara kelas samurai dan bangsawan. Kemudian memasuki Zaman Meiji, ketika Pemerintah Meiji bermaksud mengejar ketertinggalannya dari negara Barat dan ingin menjadikan Jepang sebagai negara industrialisasi, mereka menciptakan struktur keluarga yang kuat dengan menghapus kelas-kelas dalam masyarakat pada saat itu dan menerapkan sistem *Ie* sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini menjadikan struktur keluarga *chokkei kazoku* menjadi struktur keluarga yang dominan pada Zaman Meiji. Dalam konsep struktur keluarga *chokkei kazoku*, sistem *Ie* yang melandasi struktur keluarga ini membuat sebuah keluarga tidak hanya terdiri dari anggota keluarganya, tetapi juga termasuk ekonomi dengan asetnya (Fukutake, 1982).<sup>15</sup> Selain itu, status sosial seseorang juga ditentukan oleh posisinya dalam sebuah *Ie* dan bukan berdasarkan *attribute* yang dimiliki oleh individu itu sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Meskipun Marfoding menyatakan masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat homogen, tetapi hasil penelitian studi-studi Jepang terkini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat heterogen yang sama sekali tidak berbeda dengan masyarakat lainnya

<sup>14</sup> Annette Marfording, *Cultural Relativism and The Construction of Culture: An Examination of Japan*, *Human Right Quarterly*, (1997), vol. 2, 433

<sup>15</sup> *Chokei kazoku* ini berbeda dengan konsep keluarga modern yang didasari oleh pertalian keluarga dan hubungan kedekatan dengan sesama anggota keluarga

<sup>16</sup> Motonobu, *loc., cit.*, 19

Umumnya yang menjadi pewaris dan kepala keluarga dalam *chokkei kazoku* adalah anak laki-laki pertama. Terkadang jika tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus, maka akan dilakukan adopsi, yaitu mengambil anak laki-laki dari keluarga lain untuk kemudian dijadikan sebagai penerus keluarga tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kesinambungan sebuah *Ie*. Dengan demikian, *chokkei kazoku* dengan sistem *Ie* itu sendiri memiliki arti lebih dari sekedar keluarga yang berdasarkan ikatan darah. Smith (2000) menjelaskan, “Meskipun perekrutan masuk ke dalam keluarga mulanya berdasarkan kelahiran dan pernikahan, keanggotaan dalam keluarga ditentukan bukan berdasarkan darah, tetapi oleh tempat tinggal dan partisipasi dalam kerja *Ie*” (hal. 308) dan “*Ie* yang terbentuk, diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya” (hal. 307).

Pada gilirannya, ketika sistem *Ie* diberlakukan ke seluruh lapisan masyarakat, terbentuklah seperangkat nilai-nilai yang mengatur perikehidupan masyarakat Jepang pada saat itu. Khususnya dalam *chokkei kazoku*, ada tiga nilai penting yang harus dicermati yaitu, nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan.

## **2.2 Nilai-nilai terhadap Keluarga, Anak, dan Pernikahan sebelum Perang Dunia II**

### **2.2.1 Nilai-nilai terhadap Keluarga**

Dalam konteks nilai terhadap keluarga, keluarga pada saat itu memiliki arti yang sangat besar. Dalam keluarga dengan sistem *Ie*, kepentingan *Ie* melebihi kepentingan dari individu yang bersangkutan. Kesinambungan *Ie* merupakan hal yang utama. Karena kesinambungan tersebut sangat besar artinya, maka tidak jarang kepentingan individu akan dikorbankan demi keberlangsungan *Ie* tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai keluarga pada masa sebelum PD II bersifat *family oriented*.



### 2.2.2 Nilai-nilai terhadap Anak

Dalam konteks nilai terhadap anak, diketahui bahwa masyarakat pada Zaman Meiji umumnya masih mengandalkan industri primer seperti pertanian atau perikanan sebagai mata pencaharian mereka. Hal ini membuat anak pada masa ini memiliki nilai produktif sebagai tenaga kerja yang dapat membantu pekerjaan kedua orang tuanya.<sup>17</sup> Selain itu, anak pada masa ini juga memiliki nilai yang sangat besar artinya bagi keberlangsungan suatu *Ie*. Umumnya anak laki-laki dianggap memiliki nilai yang lebih besar bagi suatu *Ie* dibanding anak perempuan karena anak laki-laki yang kelak menjadi kepala keluarga dan meneruskan *Ie* tersebut.

Selain itu, anak juga dianggap dapat membuat hubungan suami istri lebih harmonis. Bagi anak perempuan, ada nilai-nilai yang harus ditaati yang terkandung dalam ajaran konfusian yang menjadi dasar sistem *Ie*, yaitu anak perempuan harus menurut pada ayahnya, dan kelak setelah menikah ia harus patuh kepada suami dan berbakti pada ibu mertuanya. Kemudian nilai anak bagi seorang istri menjadi hal yang sangat penting dalam mempertahankan posisinya dalam suatu keluarga. Karena jika dalam tiga tahun seorang istri tidak memiliki anak, maka istri tersebut harus pergi meninggalkan rumah, yaitu yang dikenal dengan istilah “*3-nen ko-naki ha sare*”. Dengan demikian, pada masa sebelum PD II anak dianggap bernilai produktif dan menjadi sangat penting keberadaannya dalam suatu keluarga.

### 2.2.3. Nilai-nilai terhadap Pernikahan

Dalam konteks nilai terhadap pernikahan, pernikahan pada masa ini tidak dipandang sebagai keputusan individu semata, melainkan keputusan yang melibatkan keluarga dan memerlukan persetujuan kepala keluarga. Sebagian besar pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang diatur (*miai kekkon*). Umumnya perempuan yang menikah akan meninggalkan *Ie*-nya dan

---

<sup>17</sup> Ochiai Emiko, *The Japanese Family System In Transition: A sociological Analysis of Family Change in Postwar Japan*, (Tokyo, 1997), 45

masuk ke dalam *Ie* suaminya. Bagi seorang perempuan, pernikahan dianggap sebagai kebahagiaan utama.<sup>18</sup> Pada masa ini, karena perempuan masih banyak memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan ekonomi, maka pernikahan juga dianggap sebagai dasar dari kestabilan ekonomi.

### 2.3 Struktur Keluarga Jepang Sesudah Perang Dunia II

Menurut Motonobu (2004) salah satu aspek sosial yang mengalami perubahan cukup besar setelah Perang Dunia II adalah struktur keluarga. Sebelum Perang Dunia II, sistem *Ie* yang diterapkan ke seluruh lapisan masyarakat, berpengaruh besar terhadap struktur keluarga melalui kekuasaan kepala keluarga dan pendidikan moral di sekolah.

Akan tetapi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 1, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perubahan struktur keluarga Jepang sesudah PD II dari *chokkei kazoku* menjadi *kaku kazoku* atau yang dikenal dengan istilah keluarga batih, seperti dihapuskannya *Meiji Minpou* pada tahun 1946, munculnya Konstitusi baru yang menghapuskan sistem *Ie*, perubahan masyarakat agraris menjadi industrialis, terjadinya urbanisasi, terbukanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya perempuan, menurunnya tingkat kelahiran, dan berakhirnya PD II.

Dari berbagai faktor di atas, faktor ekonomi memainkan peran yang sangat besar dalam perubahan struktur keluarga ini, seperti pembubaran keuangan konglomerat yang disebut *zaibatsu*<sup>19</sup>, undang-undang antimonopoli, pembaharuan lahan pertanian, dan diberlakukannya hukum perburuhan. Di awal 1950-an kehancuran ekonomi Jepang dibangkitkan oleh pengadaan khusus untuk Perang Korea dan hal ini menjadi sumber pemulihan ekonomi Jepang. Badan Perencanaan Ekonomi Jepang menyatakan dalam Survey Ekonomi Jepang tahun 1956

<sup>18</sup> *Ibid.*, 99

<sup>19</sup> *Zaibatsu* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk industry dan bisnis keuangan konglomerat pada masa Kekaisaran Jepang yang karena pengaruh dan besar organisasi menyebabkannya dapat menguasai banyak bagian penting dalam ekonomi Jepang sejak Zaman Meiji hingga berakhirnya Perang Pasifik

bahwa, "Jepang tidak lagi pasca perang." Kemudian dalam dekade yang diikuti Perang Dunia II, Jepang mengalami perbaikan ekonomi yang luar biasa. Level dari pemasukan nasional pada tahun 1955 sekitar 1.5 kali lebih tinggi dibandingkan sebelum perang (Badan Perencanaan Ekonomi, 1956). Akan tetapi, pertumbuhan ini hanya bertahan sampai tahun 1973 ketika krisis minyak menyerang.

*Gross domestic product* (GDP)<sup>20</sup> Jepang mengalami penurunan tepat setelah Perang Dunia II, tetapi pada tahun 1950-an Jepang mencapai kemajuan ekonomi. Di tahun 1955 GDP sekitar 47,075 milyar yen, tetapi kemudian meningkat menjadi 485,971 milyar yen di tahun 2000. Di tahun 1967 Jepang menjadi negara dengan GDP kedua terbesar di dunia. Telah terjadi peningkatan pada GDP per kapita sejak 1955. Hal yang perlu diperhatikan adalah fakta bahwa tingkat GDP per kapita ini tidak menggambarkan peningkatan atau penurunan pada level harga, tetapi ini menunjukkan bahwa standar hidup masing-masing masyarakat Jepang secara material mengalami peningkatan sejak Perang Dunia II.<sup>21</sup> Kemudian pada tahun 1989, Jepang akhirnya mengalami *bubble economy*<sup>22</sup>.

Ishi (1999) menjelaskan beberapa faktor yang termasuk dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Jepang. Jepang berhasil mengejar ketertinggalannya dari negara Barat di akhir tahun 1960-an, saat Jepang menjadi negara yang memiliki kekuatan industri terbesar kedua di dunia. Selama periode kemajuan ekonomi ini, pemerintah memainkan peran vital dengan tidak hanya mengatur industri, tetapi juga ikut terlibat dalam aktivitas pasar setelah Perang Dunia, meskipun hal ini berbeda dari bentuk dukungan langsung terhadap industrialisasi di awal Zaman Meiji.

Ekonomi Jepang adalah sistem yang rasional dalam konteks pembangunan ekonomi tinggi dan dalam banyak hal mengatur juga mempengaruhi cara hidup orang

---

<sup>20</sup> Menurut McEachern (2000), GDP berarti mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun.

<sup>21</sup> Motonobu, *loc. cit.*, 36

<sup>22</sup> *Bubble economy* diartikan dengan perdagangan dalam volume besar dengan harga yang sangat berbeda dengan nilai sebenarnya. Dengan kata lain, memperdagangkan suatu produk atau aset dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai fundamentalnya.

Jepang.<sup>23</sup> Para pekerja Jepang memiliki loyalitas yang besar terhadap organisasinya, khususnya pekerja laki-laki yang disebut sebagai istilah “salaryman”. Sistem *Ie* yang diberlakukan ke seluruh lapisan masyarakat juga mempengaruhi dasar dari sistem ekonomi Jepang. Akibatnya, sistem ekonomi Jepang melalui organisasi ekonomi mengatur cara hidup orang Jepang untuk beberapa dekade. Sebagai organisasi ekonomi, Jepang dianggap memiliki orientasi kelompok. Karena itu, sejak akhir Perang Dunia II, sebagian besar laki-laki Jepang mendasarkan hidup mereka pada pekerjaannya, khususnya perusahaan tempatnya bekerja. Persentase pekerja mengalami peningkatan dari 42.4% di tahun 1953 menjadi 84.5% pada tahun 2003. Sebagai tambahan, perempuan juga termasuk ke dalam masyarakat yang bekerja di perusahaan. Lingkungan pekerjaan dan keadaan lainnya, seperti halnya konstitusi baru dan cara hidup orang Jepang secara simultan mengubah struktur keluarga di Jepang.<sup>24</sup>

Lebih jauh, Motonobu (2004) menyatakan bahwa, kemajuan ekonomi menyebabkan terjadinya urbanisasi. Masyarakat pedesaan yang sebelumnya tinggal dan bekerja sebagai petani, mulai berurbanisasi ke perkotaan dimana pusat-pusat industrialisasi terletak. Urbanisasi menjadi salah satu faktor yang mendorong “pembubaran”<sup>25</sup> *chokkei kazoku*. Pembubaran keluarga dengan *chokkei kazoku* ini muncul secara perlahan-lahan selama masa industrialisasi setelah Perang Dunia II.

Berkaitan dengan urbanisasi, persentase dari pekerja di bidang agrikultur menunjukkan penurunan dari 77% pada tahun 1872 menjadi 48% di tahun 1930. Masyarakat pedesaan banyak yang berurbanisasi ke daerah perkotaan, seperti Tokyo dan Osaka. Di luar 47 prefektur lainnya, Tokyo dan Osaka mewakili 11 persen dari populasi tahun 1920 dan 17 persen di tahun 1940 (Population Redistribution and

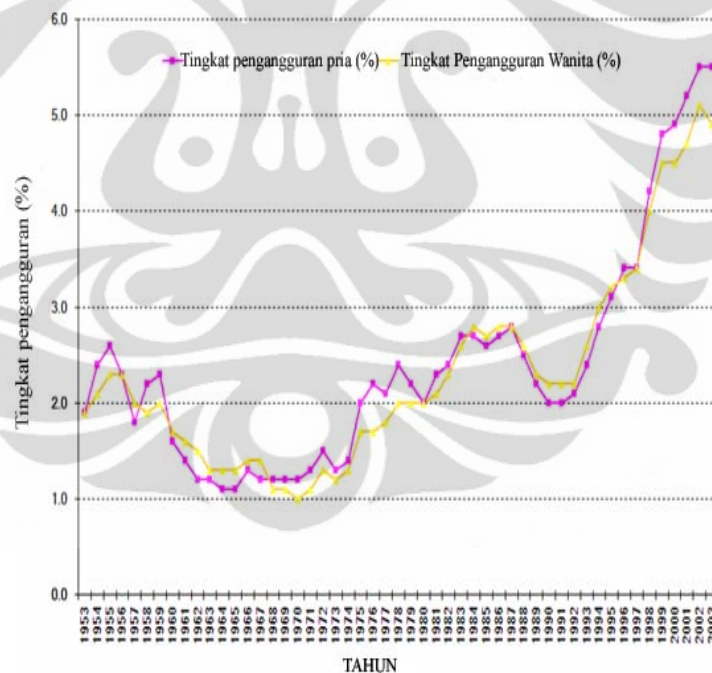
---

<sup>23</sup> Motonobu, *loc. cit.*, 36

<sup>24</sup> *Ibid.*, 44

<sup>25</sup> Pembubaran disini yaitu dimana *chokkei kazoku* yang apabila anggota di dalamnya memutuskan tinggal terpisah menyebabkan terbaginya *chokkei kazoku* menjadi menjadi beberapa struktur keluarga, seperti *kaku kazoku* dan *tanshin setai* (keluarga yang terdiri dari satu orang). Sebagai contoh, apabila *chokkei kazoku* yang terdiri dari kakek-nenek, ayah-ibu, dan anak yang belum menikah memutuskan untuk tidak tinggal bersama maka akan menghasilkan dua *kaku kazoku*. Begitu pula halnya ketika keluarga yang terdiri dari nenek, ayah-ibu, dan anak yang belum menikah tinggal terpisah, maka akan menghasilkan satu *kaku kazoku* dan satu *tanshin setai*.

Urbanization, 1943). Peningkatan urbanisasi terjadi setelah Perang Dunia II, khususnya antara tahun 1960 dan 1974. Rasio untuk orang yang tidak bekerja berdasarkan jenis kelaminnya kurang dari 2.0% (lihat Gambar 2.1). Rendahnya tingkat orang yang tidak bekerja menunjukkan adanya permintaan yang besar untuk tenaga kerja di daerah perkotaan dimana industrialisasi itu muncul dan berkembang. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang cepat turut meningkatkan urbanisasi setelah Perang Dunia II, khususnya selama periode pertumbuhan yang intens, yaitu antara tahun 1965 dan 1973. Selain itu juga, pada masa ini menurunnya tingkat *chokkei kazoku* terjadi karena kepala keluarga kehilangan kekuatan ekonomi dalam organisasi ekonominya sehingga tidak dapat mempertahankan keberlangsungan keluarga.



**Gambar 2.1**

Rasio pengangguran dalam dunia kerja berdasarkan jenis kelamin: 1953-2003

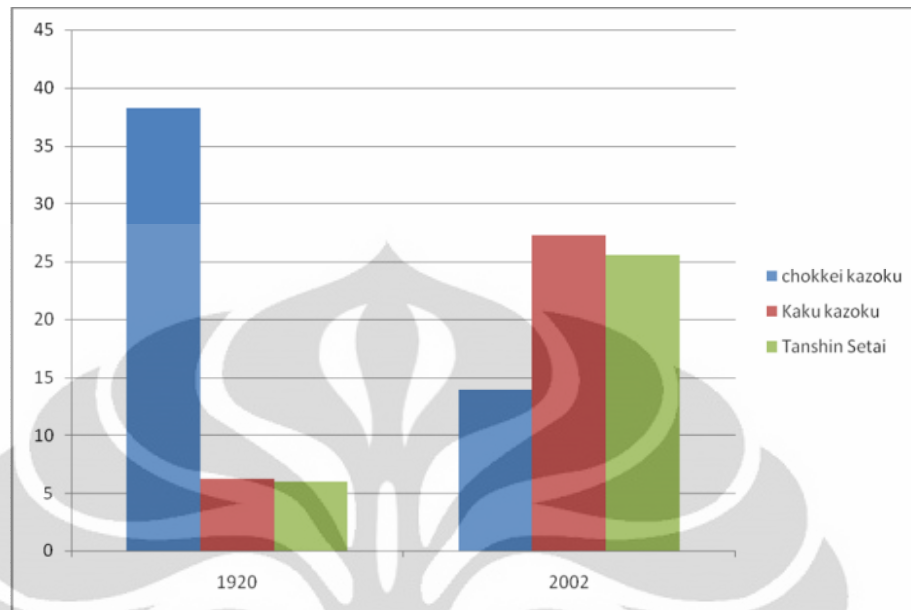
Sumber: Survey Tenaga Kerja oleh Kementerian Manajemen Publik, Urusan Rumah Tangga, Pos, dan Telekomunikasi (MPHPT), Biro Statistik.

Lebih jauh, seiring dengan dihapuskannya sistem *ie* dalam *Meiji Minpou*, serta pembentukan konstitusi baru yang mengubah hukum dan peraturan mengenai keluarga di Jepang, terjadi peningkatan jumlah *kaku kazoku* (keluarga batih). Meningkatnya *kaku kazoku* ini berkaitan dengan aturan dalam konstitusi baru dimana persetujuan kepala keluarga tidak lagi diperlukan dalam registrasi keluarga baru. Hal inilah yang pada gilirannya membuat orang yang ingin menikah tidak harus mendapat persetujuan dari kepala keluarga. Menurut George P. Murdock, keluarga batih sendiri diartikan sebagai keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah.<sup>26</sup> Hal ini tentu saja berbeda dengan *chokkei kazoku*, dimana di dalamnya terdapat tiga generasi yang tinggal bersama di bawah satu atap. Selain itu, terdapat juga keluarga yang hanya terdiri dari satu orang atau biasa disebut dengan istilah *tanshin setai*.

Berdasarkan sensus populasi di Jepang, persentase keluarga batih atau *kaku kazoku* mengalami peningkatan, yaitu 6.2% di tahun 1920 menjadi 27.3% di tahun 2000. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa *chokkei kazoku* mengalami penurunan dari 38,2% pada tahun 1920 menjadi 13,9% di tahun 2000. Sebaliknya, jumlah *tanshin setai* mengalami peningkatan yang signifikan dari 6,0% pada tahun 1920 menjadi 25,6% di tahun 2000. Dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap *tanshin setai*, memperlihatkan bahwa Jepang mulai menjadi negara yang memiliki jumlah lansia yang besar dan diperkirakan akan terus bertambah. Persentase struktur keluarga *chokkei kazoku*, *kaku kazoku*, dan *tanshin setai* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

---

<sup>26</sup> Ochiai, *op., cit.*, 59



**Gambar 2.2**

**Struktur Keluarga Jepang tahun 1920 dan 2002, data telah diolah kembali**

Sumber: Sensus Tenaga Kerja oleh Kementerian Manajemen Publik, Urusan Rumah Tangga, Pos, dan Telekomunikasi (MPHPT), Biro Statistik, data telah diolah kembali

Pada gilirannya, seiring dengan terjadinya perubahan struktur keluarga dari *chokkei kazoku* menjadi *kaku kazoku* dengan berbagai faktor yang telah dijelaskan di atas, terbetuklah perubahan terhadap nilai keluarga, anak, pernikahan sesudah PD II seperti yang akan dijelaskan lebih jauh di bawah ini.

## **2.4 Nilai-nilai terhadap Keluarga, Anak, Pernikahan setelah Perang Dunia II**

### **2.4.1 Nilai-nilai terhadap Keluarga**

Jika sebelum PD II nilai terhadap keluarga sangat besar, maka setelah PD II nilai keluarga berubah secara signifikan. Kepentingan keluarga tidak lagi dilihat sebagai kepentingan yang utama bila dibandingkan dengan kepentingan individu. Kepala keluarga tidak lagi dapat mengatur dan memutuskan segala sesuatu bagi anggota keluarganya. Kepala keluarga atau seorang suami akan bekerja mencari nafkah dan tidak lagi menjadi penentu keputusan dalam segala urusan yang menyangkut anggota keluarga yang lain. Hal ini berbeda dengan kepala keluarga dalam konteks keluarga dengan

struktur *chokkei kazoku*. Dengan demikian, pada masa sesudah PD II nilai keluarga yang sebelumnya bersifat *family oriented* berubah menjadi *individualistic oriented*.<sup>27</sup>

#### 2.4.2. Nilai-nilai terhadap Anak

Kemudian dalam konteks nilai anak, transformasi dari masyarakat agrikultural menjadi masyarakat industrial menyebabkan perubahan terhadap nilai anak.<sup>28</sup> Nilai anak yang sebelumnya bagi masyarakat agrikultural bernilai produktif, berubah menjadi bernilai konsumtif bagi masyarakat industrial.<sup>29</sup> Selain itu, keberadaan anak dalam suatu keluarga tidak lagi menjadi hal yang penting bagi pasangan yang menikah. Menurut Sugimoto (2003), generasi baru yang lahir pada tahun 1960-an dan seterusnya, khususnya perempuan, berpikir bahwa ide untuk melahirkan dan menghabiskan uang untuk pendidikan anak-anak mereka merupakan suatu kerugian ekonomi.<sup>30</sup> Seperti juga yang disampaikan Ochiai (1997) dalam bukunya, bahwa tidak ada yang salah ketika seseorang berpikir, “*Instead of having children, I plan to keep buying expensive foreign cars, one after another, all my life*” atau “*I like to travel abroad every year, so I won’t be able to afford children, and anyway, they’d only get in the way*”.<sup>31</sup> Pernyataan tersebut menggambarkan secara jelas bahwa nilai anak telah berubah dan orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri (individualistik). Sugimoto (2003) lebih jauh juga menjelaskan beberapa hal yang dianggap sebagai beban dalam hal memiliki anak, yaitu biaya pendidikan anak yang tinggi, hilangnya kebebasan waktu, energi yang besar yang harus dicurahkan untuk menangani anak, tidak bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan, tidak tahu bagaimana menangani anak, tempat

---

<sup>27</sup> Motonobu, *loc. cit.*, 65

<sup>28</sup> Ochiai, *op. cit.*, 45

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Sugimoto, *op. cit.*, 88

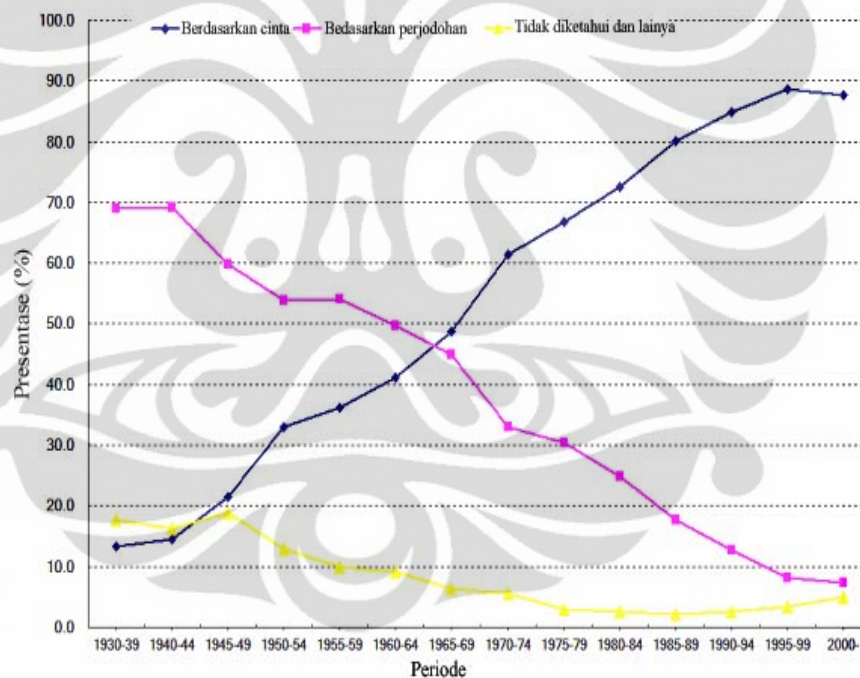
<sup>31</sup> Ochiai, *op. cit.*, 46



tinggal menjadi sempit, serta kesulitan menjaga anak dalam lingkungan orang dewasa.<sup>32</sup>

### 2.4.3. Nilai-nilai terhadap Pernikahan

Seperti halnya perubahan yang terjadi terhadap keluarga dan anak, nilai terhadap pernikahan juga mengalami perubahan. Masyarakat setelah PD II cenderung lebih banyak yang memilih *renai kekkon* dibanding *miai kekkon*. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya tingkat *renai kekkon* dan semakin menurunnya tingkat *miai kekkon* seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.3**

Tingkat (*renai kekkon*) dan (*miai kekkon*) tahun 1930-2000.

Sumber : Lembaga Nasional Populasi dan Penelitian Jaminan Sosial tahun 2002

Kemudian jika sebelum PD II pernikahan dianggap sebagai kebahagiaan utama seorang perempuan, setelah PD II perempuan justru

<sup>32</sup> Sugimoto, op., cit., 89

banyak yang menunda untuk menikah (*bankonka*). Sugimoto (2003) pun menjelaskan beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab perempuan menunda pernikahan, yaitu beban keuangan, kebebasan yang terbatas, sulitnya bekerja sama dalam tugas rumah tangga, sulitnya membesarkan anak, pekerjaan rumah tangga, mengurus orang tua, adanya ketergantungan antar generasi (anak dengan orang tua), keresahan lansia tentang kehidupan di hari tua, *parasitosinguru*<sup>33</sup> yang bergantung pada orang tua, meningkatnya harapan bantuan anak perempuan yang telah menikah untuk mengurus anak, meningkatnya pendidikan perempuan, meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja, serta sulitnya bekerja sambil mengurus anak.<sup>34</sup>

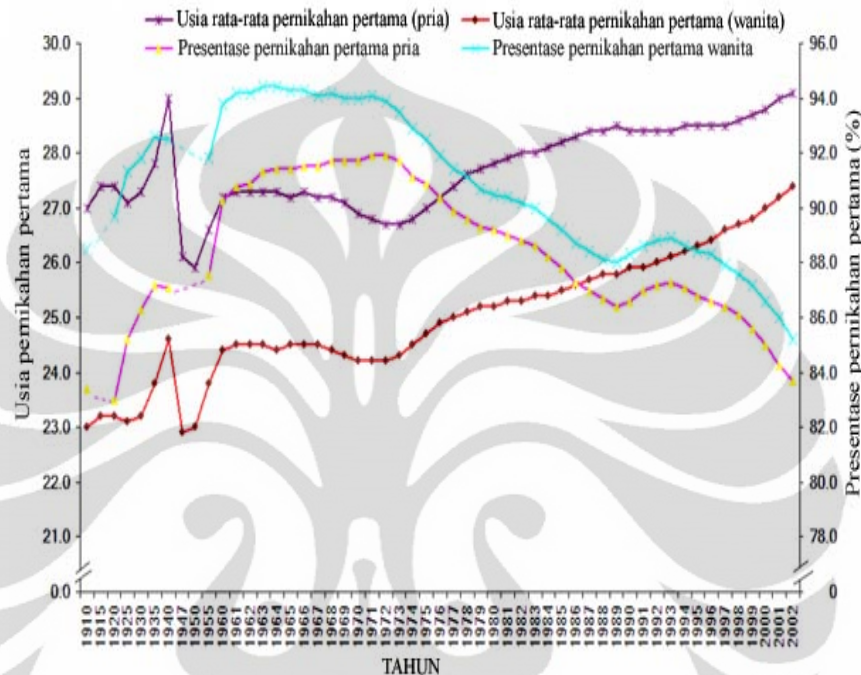
Berkaitan dengan perempuan yang menunda menikah, survey ke-12 tahun 2002 mengenai pernikahan dan kelahiran terhadap lajang, 63% dari sample laki-laki dan 68% dari sample perempuan menjawab bahwa keuntungan yang paling penting dari melajang adalah kebebasan dalam menjalani hidup. Kenyamanan dari hidup melajang menimbulkan penundaan terhadap waktu menikah dan meningkatkan pandangan individualistik dalam masyarakat, khususnya perempuan. Dengan hal itu, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan dalam hidupnya dibandingkan jika mereka menikah.

Kemudian masih berkaitan dengan penundaan pernikahan, usia rata-rata pernikahan pertama bagi laki-laki meningkat dari 27,0 tahun pada tahun 1910 menjadi 29,1 tahun di tahun 2002. Di sisi lain, usia rata-rata pernikahan pertama bagi perempuan meningkat tajam dari 23,0 tahun pada tahun 1910 menjadi 27,4 tahun di tahun 2002 (lihat Gambar 2.3). peningkatan pendidikan dan perbaikan status perempuan mengubah sikap atau cara pandang perempuan terhadap pernikahan dan meningkatkan usia rata-rata pernikahan. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah orang yang belum menikah di usia mereka yang secara sosial dianggap sudah pantas menikah.

<sup>33</sup> *Parasitosinguru* adalah seseorang yang tinggal dengan orang tua mereka di usia dua puluhan akhir dengan maksud untuk menikmati kehidupan yang nyaman.

<sup>34</sup> Sugimoto, *op., cit.*, 89

Dengan demikian, pernikahan sesudah PD II tidak lagi dilihat sebagai keputusan yang perlu melibatkan keluarga dan persetujuan kepala keluarga melainkan berdasarkan keputusan masing-masing individu.<sup>35</sup>



Gambar 2.4

Rata-rata usia pernikahan pertama laki-laki dan perempuan dan persentase pernikahan pertama pengantin laki-laki dan perempuan: 1910-2002.

Sumber: data berasal dari Vital Statistik Jepang oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, Departemen Statistik dan Informasi. Data untuk tahun 1947-1972 tidak mengikutsertakan Prefektur Okinawa.

Lebih jauh, Gambar 2.4 di atas menunjukkan bahwa usia pertama menikah bagi laki-laki maupun perempuan terus mengalami kemunduran. Hal ini memperlihatkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan lebih memilih untuk menikmati masa lajangnya daripada memutuskan untuk menikah pada usia muda ataupun usia yang dianggap matang untuk menikah. Khususnya bagi perempuan, pernikahan tidak lagi dipandang sebagai suatu keharusan ataupun kebahagiaan yang utama.

<sup>35</sup> Motonobu, *loc., cit.*, 62

Sebagai tambahan, berdasarkan *National Opinion Survey* oleh kantor Perdana Menteri (1972, 1982, dan 1992) yang mengangkat masalah mengenai “perempuan dan pernikahan.” Mereka yang menginginkan “menikah” (total dari responden yang menjawab “kebahagiaan utama perempuan terletak pada pernikahan”, “perempuan menjadi stabil secara mental maupun ekonomi oleh pernikahan,” atau “merupakan hal yang alamiah sebagai manusia untuk menikah”) mengalami penurunan, di antara laki-laki dan perempuan, dalam periode 1972 sampai 1990 dari 80% menjadi 40%.

Di sisi lain, proporsi responden yang menjawab “tidak perlu bagi perempuan untuk menikah” mengalami peningkatan (PRS<sup>36</sup> 1972 dan 1992; WAS<sup>37</sup> 1982). Semakin muda usia responden (30 tahun ke bawah), maka semakin sedikit yang menganggap bahwa “perempuan seharusnya menikah”. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat pada masa ini secara keseluruhan menjadi lebih toleran terhadap perempuan yang tidak menikah.<sup>38</sup>

Dengan demikian, dapat secara singkat disimpulkan bahwa industrialisasi dan kemajuan ekonomi menyebabkan perubahan pada struktur keluarga Jepang setelah PD II. Pada gilirannya perubahan struktur keluarga ini menyebabkan perubahan terhadap nilai keluarga, anak, dan pernikahan. Nilai keluarga berubah dari yang sebelumnya bersifat *family oriented* menjadi *individualistic oriented*. Nilai anak, berubah dari yang sebelumnya anak bernilai produktif menjadi bernilai konsumtif dan keberadaan seorang anak tidak lagi dianggap penting dalam suatu keluarga. Demikian pula halnya dengan nilai pernikahan. Pernikahan yang sebelumnya dianggap sebagai kebahagiaan utama seorang perempuan dan stabilitas ekonomi, setelah PD II dianggap tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia bagi seorang perempuan dan juga pernikahan tidak lagi menjadi keputusan yang melibatkan keluarga, melainkan berdasarkan keputusan individu itu sendiri.

---

<sup>36</sup> Public Relation Section (PRS), Prime Minister’s Office, Value Survey on Women, 1972. ----- . Opinion Poll on Gender Equality, 1992

<sup>37</sup> Women’s Affair Section (WAS), Prime Minister’s Office, 1982. International Comparative Survey on Women’s Issues

<sup>38</sup> Atoh, *loc. cit.*, 15

**BAB 3**  
**PERCERAIAN SEBELUM DAN SESUDAH PERANG DUNIA II DAN**  
**PERUBAHAN PERSEPSI PEREMPUAN JEPANG TERHADAP**  
**PERCERAIAN**

**3.1 Perceraian di Jepang**

**3.1.1 Jenis Perceraian di Jepang**

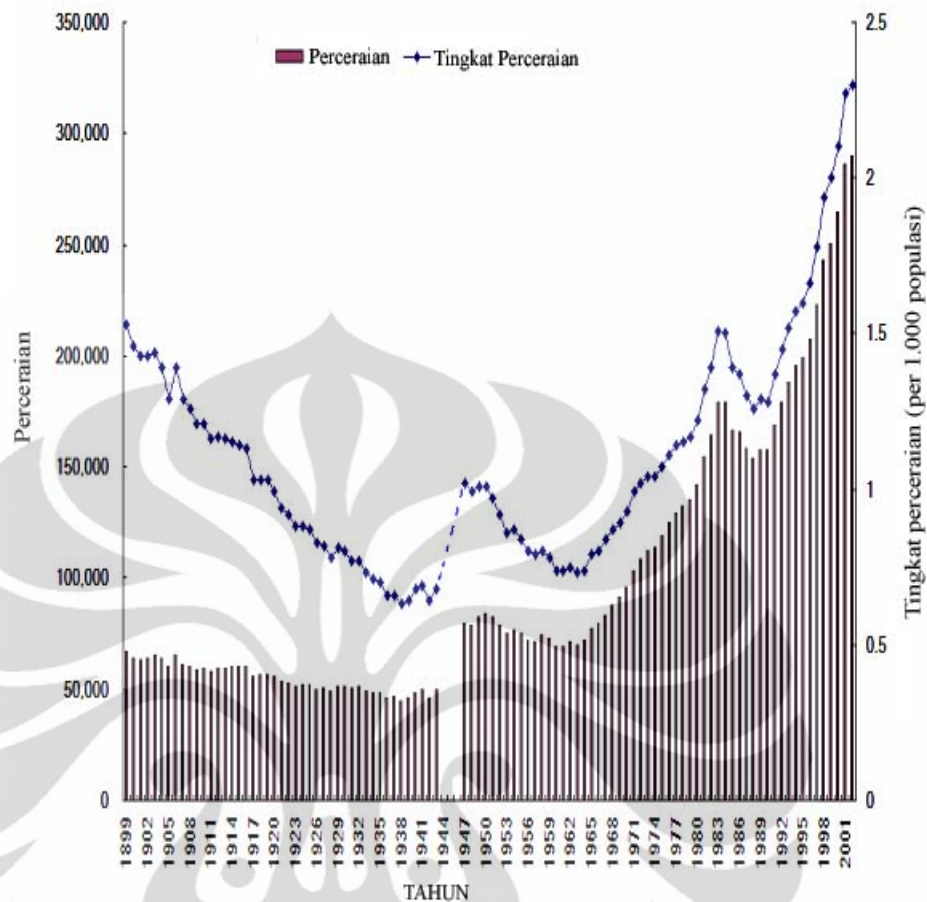
Setiap negara memiliki jenis perceraian yang berbeda-beda. Beberapa negara mengharuskan bagi pasangan yang akan bercerai untuk bercerai secara sah melalui putusan pengadilan. Sedangkan di Jepang, perceraian melalui pengadilan tidak menjadi satu-satunya jenis perceraian yang ada.

Di Jepang, ada empat jenis perceraian, pertama. perceraian berdasarkan keputusan bersama (*kyogi rikon*); kedua, perceraian berdasarkan konsultasi (*chotei rikon*). Jenis perceraian ini adalah jenis perceraian di mana apabila masing-masing suami dan istri sudah berniat untuk bercerai tetapi belum mencapai kesepakatan. Untuk itu mereka dapat mendiskusikannya di pengadilan setempat. Ketiga, perceraian berdasarkan penyesuaian (*shinpan rikon*). Jenis perceraian ini terjadi apabila mufakat itu belum juga tercapai, sehingga pengadilan dapat menggantinya dengan putusan pengadilan; dan yang terakhir adalah perceraian menurut hukum pengadilan (*saiban rikon*). Perceraian ini adalah satu-satunya perceraian yang berdasarkan aturan atau UU Sipil pasal 770 dimana aturan ini memperbolehkan pasangan untuk bercerai apabila sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) ketika salah satu dari suami istri tersebut tidak setia terhadap pasangannya, (2) ketika salah satu pasangan ditinggalkan oleh pasangannya, (3) ketika salah satu pasangan tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari tiga tahun, (4) ketika salah satu pasangan sakit secara mental dan hanya memiliki peluang kecil untuk dapat sembuh, dan (5) ketika salah satu pasangan memiliki alasan serius yang membuatnya sulit untuk melanjutkan kehidupan pernikahan tersebut (Motonobu, 2004). Perceraian berdasarkan keputusan

atau kesepakatan bersama (*kyogi rikon*) dan berdasarkan keputusan pengadilan (*saiban rikon*) baru ada pada tahun 1910 sampai sekitar tahun 1947. Kemudian semenjak tahun 1950, ada dua jenis perceraian yang baru yaitu perceraian berdasarkan konsiliasi (*chotei rikon*) dan perceraian berdasarkan penyesuaian (*shinpan rikon*). Lalu sebagai tambahan, pada tahun 2004, muncul lagi jenis perceraian yang berbeda, yaitu perceraian berdasarkan kompromi (*divorce by compromise*) dan perceraian berdasarkan pengakuan klaim (*divorce by acknowledgement of claim*). Secara umum bentuk perceraian yang paling banyak terjadi di Jepang adalah perceraian berdasarkan keputusan bersama (*kyogi rikon*). (Lihat Lampiran 1)

### **3.1.2 Angka Perceraian di Jepang Sebelum dan Sesudah PD II**

Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.1 di bawah ini, angka perceraian di Jepang pada tahun 1883 mencapai 3.38 per 1,000 populasi. Akan tetapi, angka ini terus mengalami penurunan hingga Perang Dunia II. Pada tahun 1938 angka perceraian sempat mencapai angka terendahnya, yaitu 0.63 per 1,000 populasi. Namun demikian, satu hal penting yang harus dicatat adalah bahwa angka perceraian mencapai titik baliknya di tahun 1960-an, yaitu 0.73 per 1,000 populasi dan mencapai puncaknya di tahun 1980-an. Sejak saat itu angka perceraian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2002 mencapai angka 2.30 per 1,000 populasi. Untuk memudahkan analisa, studi ini membagi analisis mengenai perceraian menjadi dua periode, yaitu periode sebelum Perang Dunia II dan periode sesudah Perang Dunia II.



**Gambar 3.1** Tingkat perceraian per 1,000 populasi 1889-2002.

Sumber: Nihon Teikoku Tokei Nenkan [The 38<sup>th</sup> Statistics Yearbook of Imperial Japan and Vital Statistics of Imperial Japan]. Catatan\* Kabinet Biro Statistik untuk data 1943 dan sebelumnya, dan Vital Statistik Jepang oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan untuk data 1947 dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa data dari tahun 1944 sampai 1946 dihilangkan karena ketidaklengkapan berdasarkan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan: data untuk 1947-1972 tidak mengikutsertakan Prefektur Okinawa.

### 3.2 Perceraian Sebelum Perang Dunia II

Beberapa studi mengenai perceraian pada Zaman Edo (1600-1868) didasarkan pada praktek perceraian yang biasa dilakukan di antara kelas petani.<sup>39</sup> Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa prosedur yang ditempuh untuk bercerai tidaklah sulit. Perceraian di kalangan petani mensyaratkan surat cerai yang diserahkan suami kepada istri (dikenal dengan “tiga setengah baris” biasanya

<sup>39</sup> Kurosu, *loc. cit.*, 120



sebuah pesan singkat).<sup>40</sup> Tanpa surat ini, orang tersebut tidak dapat menikah lagi.<sup>41</sup> Lalu pada masa ini banyak juga orang yang bercerai lalu menikah kembali atau dikenal dengan istilah *saikon* (再婚). Perceraian pada saat itu dilihat sebagai suatu hal yang wajar dan proses yang harus dilalui tidaklah terlalu sulit. Lebih dari dua pertiga pernikahan pertama berakhir dengan perceraian bahkan sebelum masing-masing individu yang menikah mencapai usia lima puluh tahun.<sup>42</sup>

Pernikahan yang didasarkan pada ketertarikan masing-masing individu atau berdasarkan cinta merupakan hal yang sangat jarang.<sup>43</sup> Pernikahan dan cinta dianggap sebagai dua hal yang terpisah. Secara umum, konsep dari cinta merupakan suatu konsep yang cukup modern bagi masyarakat Jepang saat itu.<sup>44</sup> Sebelum Zaman Meiji, poligami atau jenis pernikahan dimana suami mengunjungi sang istri di rumahnya merupakan hal yang biasa di desa-desa pertanian. Di sisi lain, pernikahan yang diatur (*miai kekkon*) menjadi hal yang biasa di kalangan kelas samurai. Saat itu perceraian lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Di pedesaan, poligami dan prostitusi merupakan suatu hal biasa, sedangkan monogami atau sistem pernikahan itu sendiri merupakan praktek yang sangat jarang dilakukan.<sup>45</sup>

Di kalangan masyarakat kelas bangsawan atau samurai angka perceraian berkisar antara 7-19%, sedangkan angka perceraian di kalangan masyarakat pertanian lebih tinggi. Hal ini karena kelas bangsawan dan samurai pada saat itu telah lebih dulu menerapkan sistem *Ie*. Pada tahun 1883, Jepang mencapai angka perceraian tertinggi, yaitu 3,39 per 1,000 populasi. Perceraian bahkan menjadi praktek yang sering dilakukan di daerah sebelah timur Jepang, yaitu daerah Shimomoriya dan Niita di Fukushima.<sup>46</sup> Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa perceraian bukanlah hal yang tidak biasa bagi masyarakat Jepang. Menurut Fuess (2004), angka perceraian yang tinggi pada tahun 1883 merupakan dampak dari adanya suatu konsep yaitu bahwa pernikahan dipandang sebagai

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, 118

<sup>43</sup> Motonobu, *loc. cit.*, 15

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, 16

<sup>46</sup> Kurosu, *loc. cit.*, 124



suatu uji coba terhadap pasangan (*marriage as spousal testing*), daripada melihatnya sebagai komitmen seumur hidup.

Kemudian, ketika Jepang mulai memasuki Zaman Meiji, pemerintah Meiji berusaha untuk mencapai industrialisasi segera setelah Restorasi. Seperti halnya negara-negara Barat, industrialisasi membawa banyak perubahan bagi masyarakat Jepang. Tetapi ada satu hal yang menarik dan berbeda dari Jepang dibandingkan dengan negara-negara Barat, yaitu masalah yang berkaitan dengan angka perceraian. Di negara-negara Barat, industrialisasi memicu peningkatan angka perceraian, tetapi di Jepang, angka perceraian justru mengalami penurunan.<sup>47</sup> Angka perceraian pada tahun 1899 mencapai 1.53 per 1,000 populasi, lalu menurun menjadi 1.46 per 1,000 populasi di tahun 1900. Kemudian angka tersebut terus mengalami penurunan sampai setelah Perang Dunia II.

Salah satu penyebab menurunnya angka perceraian sebelum PD II adalah Restorasi Meiji yang terjadi tahun 1868. Pada periode ini, pemerintah bermaksud mengejar ketertinggalannya dari negara-negara Barat, dan menciptakan suatu sistem keluarga yang kuat dengan kaisar sebagai kepala keluarga atau yang dikenal dengan istilah “ideologi politik” pada masa pemerintahan Meiji.<sup>48</sup> Pemerintah akhirnya membuat suatu undang-undang yang dikenal dengan nama *Meiji Minpou* dimana sistem kelas sosial secara resmi dihapus dan seluruh masyarakat Jepang menjadi satu dibawah Kaisar. Pemerintah Meiji juga mengatur agar sistem keluarga dengan ideologi *Ie* yang sebelumnya hanya ada pada kalangan atas, seperti *shogun* dan *samurai*, untuk diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan petani dan lainnya.

Selain itu, pada tahun 1872 diperkenalkan sebuah sistem registrasi keluarga yang modern untuk pertama kalinya, atau yang biasa disebut dengan istilah *koseki*, dimana segala informasi penting yang berkaitan dengan kondisi suatu keluarga, seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan adopsi dicatat secara jelas dan terperinci. *Koseki* ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7. Akan tetapi, pemerintah Meiji mulai membuat sistem registrasi keluarga yang

<sup>47</sup> Motonobu, *loc. cit.*, 5

<sup>48</sup> Melalui konstitusi, pemerintah Meiji memperkenalkan cara baru dalam memerintah masyarakat, berdasarkan perspektif ideologi yang menggambarkan masyarakat Jepang sebagai keluarga luas yang dikepalai Kaisar. Untuk selanjutnya dalam studi ini akan menggunakan istilah “ideologi politik”, Motonobu, 17-18

modern ini baru pada tahun 1872, dimana sistem ini mewajibkan seluruh masyarakat Jepang untuk memiliki nama keluarga, sehingga konsep garis keturunan dalam keluarga dibangun dan diinkorporasikan ke dalam *koseki*.

Sugimoto (2003) berargumentasi bahwa *koseki* adalah pusat dari struktur keluarga Jepang, dan biasanya merepresentasikan aspek *ura* dari struktur keluarga tersebut. *Koseki* ini mencatat berbagai informasi penting seperti halnya kelahiran, kematian, pernikahan, dan juga perceraian. Unit paling mendasar dari *koseki* bukanlah individual, melainkan rumah tangga. Secara teknis, seseorang dapat keluar dari *koseki*nya dan membuat *koseki* baru. Tetapi umumnya, hal itu dilakukan pada saat orang menikah. *Koseki* biasanya dibutuhkan untuk suatu kondisi tertentu, seperti saat melamar pekerjaan atau menikah.

Di balik sistem registrasi keluarga ini, terbentang ideologi *Ie*, yang secara harfiah berarti *home*, *house*, atau *family*, tetapi sebenarnya ideologi *Ie* memiliki arti lebih dari itu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *Ie* merepresentasikan unit “quasi-kinship” dengan kepala keluarga baik melalui hubungan darah maupun tidak. Dalam *Meiji Minpou* sebelum PD II kepala keluarga memiliki kekuasaan penuh dalam seluruh aspek keluarga termasuk memilih pasangan menikah untuk anggota keluarganya. Kepemimpinan *Ie* diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui hubungan darah. Sehingga anak laki-laki pertama biasanya mewarisi sebagian besar properti, kekayaan, keistimewaan, dan yang paling penting, kepemimpinan *Ie*. Secara umum, anak laki-laki kedua dan seterusnya membangun keluarganya sendiri (*bunke*) terpisah dari keluarga inti (*honke*), dan tetap berada di bawah posisi subordinat dari keluarga intinya. Untuk keberlangsungan sebuah *Ie*, merupakan suatu hal yang biasa untuk mengadopsi anak laki-laki dari keluarga yang berbeda. Setiap *Ie* diharapkan untuk memberi *support* kepada sistem kerajaan.

UU Sipil sesudah PD II menghapuskan sebagian besar sistem patriarkal ini dan melalui Konstitusi yang baru diperkenalkanlah prinsip-prinsip umum kesetaraan gender. Namun demikian, sebenarnya sistem *Ie* dan sejumlah prakteknya masih bertahan dalam kehidupan masyarakat Jepang saat ini, sebagaimana yang terwujud dalam sistem *koseki* yang merugikan perempuan dalam banyak hal, termasuk perceraian.

Lebih jauh, Sugimoto (2003) berargumentasi bahwa sistem *koseki* berfungsi sebagai penghalang bagi perempuan untuk bercerai sebelum PD II, dan dengan demikian mengkristalkan struktur pernikahan yang berdasarkan prinsip-prinsip patriarkal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat perceraian di Jepang meningkat secara progresif setelah PD II, khususnya sejak tahun 1960-an, dan mencapai puncaknya pada awal 1980-an. Namun ketika diberlakukannya UU Sipil Meiji sebelum PD II dan konsolidasi nasional akan sistem *koseki*, perceraian menjadi persoalan yang diatur oleh negara dan pemerintah, sehingga tingkat perceraian relatif rendah dan termasuk yang paling rendah di antara negara-negara maju di dunia.

Alasan ekonomi, tentu saja menjadi alasan utama mengapa perempuan bertahan dalam pernikahan; mereka yang tergantung secara finansial kepada suami memiliki sedikit pilihan dan terpaksa harus memilih untuk terus hidup bersama suaminya. Sebagai tambahan dari penghalang utama ini, sistem *koseki* menjadi penghalang tambahan bagi perempuan untuk bercerai. Perceraian membuat sebuah *koseki* terbagi menjadi dua *koseki* yang berbeda dan apabila pasangan tersebut memiliki anak, setiap anak harus masuk ke dalam salah satu *koseki* orangtuanya, dalam hal ini sebagian besar masuk ke dalam *koseki* ibunya. Karena salinan *koseki* ini seringkali dibutuhkan dalam berbagai situasi, seperti melamar pekerjaan dan pernikahan, seorang individu dapat memperoleh stigma perceraian sebagai anak dari pasangan yang bercerai melalui dokumentasi publik ini. Ketakutan sebagian besar orangtua akan stigma perceraian yang dipikul oleh anaknya melalui *koseki* ini, menyebabkan banyak perempuan yang sangat memikirkan kebaikan dan masa depan anaknya, cenderung untuk menghindari perceraian, meskipun hal itu adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki.

Terbatas pada data yang diperoleh sebelum PD II, angka perceraian dalam hubungannya dengan berbagai jenis perceraian yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti *kyogi rikon*, *chotei rikon*, *shinpan rikon*, dan *saiban rikon* belum diketahui sebelum tahun 1910. Untuk angka perceraian pada jenis *kyogi rikon* dan *saiban rikon* baru tercatat setelah tahun 1910, sedangkan untuk *chotei rikon* dan *shinpan rikon* baru tercatat pada tahun 1950. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 1910 tercatat 59,432 kasus perceraian dan 99.3% dari kasus tersebut merupakan

perceraian berdasarkan keputusan bersama (*kyogi rikon*) dan 0.7% merupakan perceraian yang berdasarkan hukum (*saiban rikon*).

### 3.3 Perceraian Sesudah Perang Dunia II

Selama periode sesudah PD II industrialisasi berdampak besar terhadap modernisasi di Jepang. Secara sosial, masyarakat Jepang banyak mengalami perubahan semenjak Perang Dunia II, di antaranya munculnya nilai-nilai baru terhadap pernikahan dan perceraian.<sup>49</sup>

Angka perceraian mulai mencapai titik baliknya sekitar tahun 1960-an. Motonobu (2004) melihat hal ini terjadi karena kemajuan ekonomi dan bukan lagi ideologi politik. Menurutnya, setelah Perang Dunia II, kemajuan ekonomi membawa perubahan struktur sosial, di antaranya perubahan struktur keluarga.

Perubahan struktur keluarga ini didahului oleh hadirnya Konstitusi baru setelah Perang Dunia II, yang mendorong orang-orang untuk membebaskan dirinya sendiri dari keterikatan nilai-nilai keluarga tradisional.<sup>50</sup> Konstitusi yang baru ini diumumkan pada tahun 1946 dan memperlihatkan hasil pada tahun 1947, dan revisi dari UU Sipil, khususnya yang berkaitan dengan penghapusan sistem *Ie*, menjadi efektif pada tahun 1947. Aturan-aturan dalam sistem *Ie* berbeda dengan aturan-aturan yang terkandung dalam Konstitusi baru ini. Antara lain, dalam sistem *Ie*, kepala keluarga diberikan kekuasaan atas anggota *Ie* yang lain, tetapi di bawah Konstitusi yang baru, ia kehilangan kekuasaannya secara formal.

Motonobu (2004) menegaskan Konstitusi yang baru dibuat berdasarkan prinsip demokrasi. Sistem pemerintahan dengan Kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi masih tetap bertahan, tetapi ia hanya dikenal sebagai simbol masyarakat Jepang (“Konstitusi Jepang”, Article 1, 1946). Yang paling utama, konstitusi yang baru juga menetapkan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya eksistensinya sebagai manusia yang merdeka, bebas dari diskriminasi, bebas untuk menikah dengan pasangan yang dipilihnya, serta pengakuan terhadap kesetaraan gender, sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi tersebut sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Motonobu, *loc., cit.*, 62

<sup>50</sup> *Ibid.*, 31

*“All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs. (Article 13)*

Terjemahan:

Semua orang harus dihormati sebagai individu. Mereka memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan, sejauh tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat, menjadi pertimbangan tertinggi dalam legislasi dan dalam urusan pemerintahan lainnya. (Artikel 13)

*All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin. (Article 14)*

Terjemahan:

Semua orang sejajar di bawah hukum dan tidak akan ada diskriminasi dalam politik, ekonomi atau hubungan sosial karena ras, keyakinan, jenis kelamin, status sosial atau asal keluarga. (Artikel 14)

*Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis. (2) With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes. “ (Article 24)*

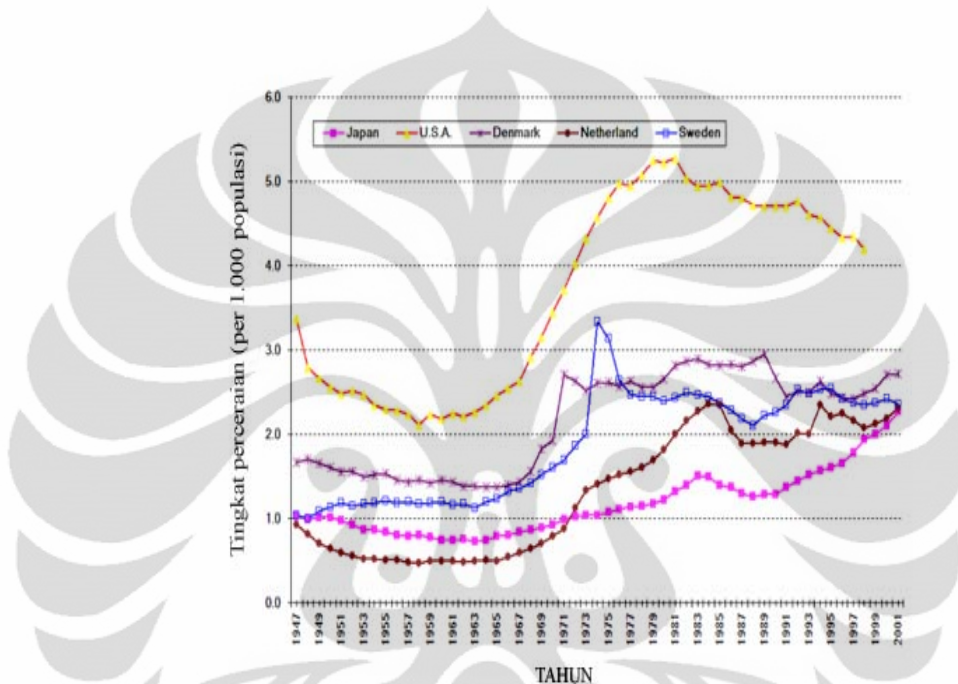
Terjemahan:

Pernikahan harus didasarkan hanya pada kesepakatan bersama dari keduanya dan akan dipertahankan melalui kerjasama dengan hak yang sama antara suami istri sebagai dasar. (2) Berkenaan dengan pemilihan pasangan hidup, hak kekayaan, warisan, pemilihan tempat tinggal, perceraian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, hokum akan berlaku dari sudut pandang individu dan pentingnya kesetaraan antar jenis kelamin. (Artikel 24)

Dengan demikian, kemajuan ekonomi yang mempengaruhi perubahan struktur keluarga sesudah PD II, secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya angka perceraian yang mencapai puncaknya pada tahun 1980-an.

Sugimoto (2003) berargumentasi bahwa angka perceraian di Jepang sebenarnya terhitung relatif rendah apabila dibandingkan dengan angka perceraian di negara-negara Barat sebelum tahun 1980-an. Akan tetapi, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3.2 di bawah ini, angka perceraian terus mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai level yang sebanding dengan

negara-negara Eropa.<sup>51</sup> Pada awal abad 21, satu dari tiga pernikahan di Jepang berakhir dengan perceraian.<sup>52</sup> Kemudian seperti yang telah disebutkan pada Bab I, kasus perceraian sesudah Perang Dunia II lebih banyak melibatkan pasangan yang menikah kurang dari dua tahun.<sup>53</sup> Akan tetapi, sejak tahun 1970-an tren ini mulai berubah. Perceraian juga mulai banyak terjadi pada pasangan yang menikah lebih dari sepuluh tahun.<sup>54</sup>



Gambar 3.2

Tingkat perceraian per 1,000 populasi di negara maju: 1947-2001.

Sumber: United Nations Demographic Yearbook 1958, 1968, 1976, 1990, 1991, 1997, dan 2001.

Sekitar 90% kasus perceraian merupakan perceraian yang didasari atas keputusan bersama (*kyogi rikon*). Hanya ada sekitar 1% yang membawa masalah perceraian ke meja sidang. Hal ini karena jika perceraian dibawa sampai ke persidangan, maka akan membawa kerugian bagi pihak yang kalah karena harus membayar biaya persidangan bagi pihak yang menang (Postner, 1998) dan (Kamseyer, 2000). Perceraian berdasarkan keputusan bersama (*kyogi rikon*) ini

<sup>51</sup> Sugimoto, *op. cit.*, 171

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

juga umumnya terjadi di antara pasangan muda. Sementara untuk mereka yang bercerai di usia tua, dimana angka perceraian untuk kasus ini terbilang rendah, perceraian lebih banyak bergantung pada putusan pengadilan karena perceraian di kalangan lanjut usia juga turut melibatkan masalah aset kepemilikan, harta, dan juga anak.<sup>55</sup>

Lebih lanjut, Sugimoto (2003) menyatakan bahwa penyebab peningkatan angka perceraian sesudah PD II adalah (1) di perkotaan, khususnya di kalangan masyarakat berpendidikan, terjadi penyebaran secara perlahan mengenai feminisme yang pada akhirnya menurunkan stigma perceraian, (2) tingginya tingkat pendidikan perempuan juga dianggap menjadi salah satu faktor yang turut meningkatkan angka perceraian, (3) dan yang ketiga adalah semakin banyaknya partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang akhirnya membuat perempuan lebih mapan dan mandiri secara finansial, sehingga perempuan yang mapan tidak perlu merasa khawatir jika harus bercerai dan membesarkan anaknya seorang diri.

Studi ini berargumentasi bahwa industrialisasi Meiji menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang, salah satunya adalah perubahan pada struktur keluarga. Perubahan struktur keluarga ini menyebabkan perubahan nilai keluarga, anak, dan pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan secara mendalam pada Bab II.

Perubahan nilai-nilai tersebut pada gilirannya menyebabkan perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian, dan pada akhirnya, perubahan persepsi ini turut mempengaruhi peningkatan angka perceraian sesudah PD II. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dijelaskan bagaimana perubahan persepsi perempuan Jepang sebelum dan sesudah PD II.

### **3.4. Persepsi Perempuan Jepang Terhadap Perceraian**

#### **3.4.1 Persepsi Perempuan Jepang terhadap Perceraian sebelum Perang Dunia II**

Berbeda dengan Zaman Meiji awal saat industrialisasi belum tercapai secara penuh. Saat itu perceraian masih dianggap sebagai suatu hal yang biasa, khususnya di kalangan petani. Perceraian pada Zaman

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

Meiji setelah memasuki industrialisasi dan ditetapkannya *Meiji Minpou* dianggap sebagai suatu hal yang tidak lazim.<sup>56</sup> Dalam struktur keluarga *chokkei kazoku* yang menerapkan sistem *Ie*, perempuan tidak diperbolehkan meminta cerai kepada suaminya, kecuali jika suaminya yang menceraikan. Perempuan yang diceraikan suaminya biasanya akan dikembalikan ke rumahnya, dan bagi keluarga yang anak perempuannya dikembalikan karena diceraikan, hal itu dianggap sebagai sebuah aib. Adanya stigma sosial juga menjadikan masyarakat pada saat itu tidak melihat perceraian sebagai suatu hal yang wajar.

Perceraian dilihat sebagai suatu stigma sosial pada masa ini karena keluarga dan hubungan kekerabatan dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam pernikahan.<sup>57</sup> Dalam studi Hiroshi Ono juga dikatakan, “ketika kamu menikah, maka kamu menikah untuk orang di sekelilingmu,” pernikahan di Jepang pada masa ini tidak dilihat sebagai suatu hal yang bersifat pribadi, tetapi lebih kepada keinginan keluarga dan kerabat yang terkait.<sup>58</sup> Menjadi hal yang biasa bagi perempuan pada masa ini untuk mencari persetujuan jika ingin bercerai. Dengan demikian, stigma sosial cenderung melekat pada perceraian karena perceraian tidak hanya menjadi urusan pribadi atau perpisahan dengan pasangan, tetapi juga perpisahan yang melibatkan keluarga.<sup>59</sup> Selain itu, stigma sosial tersebut akan terus melekat pada kehidupan seorang perempuan yang bercerai karena perceraian tersebut akan tercatat di dalam *kosekinya*. Bagi banyak perempuan hal ini dianggap sebagai sebuah “noda” yang tidak akan pernah hilang dan akan mempengaruhi baik kehidupannya maupun kehidupan anaknya kelak.

---

<sup>56</sup> Kurosu, *loc., cit.*, hal 118

<sup>57</sup> Hiroshi Ono, *Divorce in Japan Why It Happens, Why It Doesn't*, (Stockholm, 2006), 8

<sup>58</sup> Mary C. Brinton, “*Christmas Cakes and Wedding Cakes: The Social Organization of Japanese Women's Life Course.*” (1992), 99

<sup>59</sup> Ono, *loc., cit.*, 8



### 3.4.2. Persepsi Perempuan Jepang terhadap Perceraian sesudah Perang Dunia II

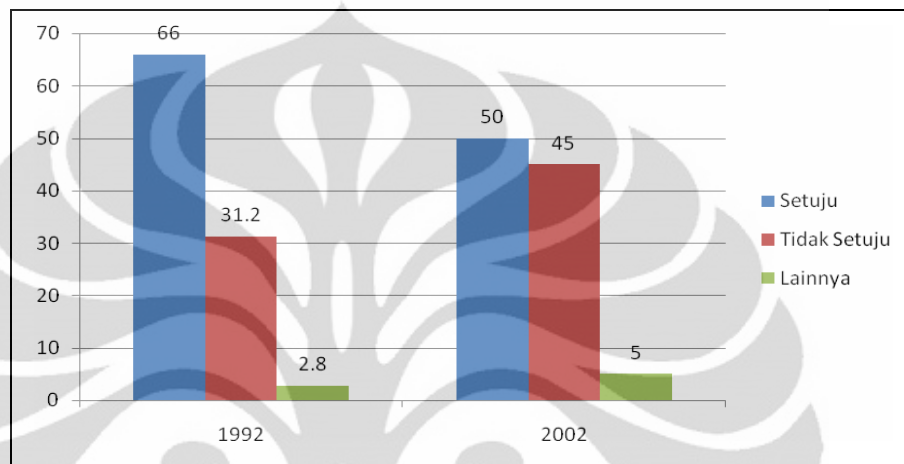
Perceraian pada masa sesudah Perang Dunia II tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang tidak lazim. Ini terlihat dari meningkatnya angka perceraian secara perlahan-lahan pada tahun 1960-an, mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, dan pada akhirnya mencapai angka 2.30 di tahun 2002. Dengan semakin tingginya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja, perempuan memiliki kemandirian dalam hal finansial.<sup>60</sup> Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat perempuan tidak lagi merasa takut atau ragu untuk bercerai jika pernikahan yang dijalani dirasa tidak lagi dapat dipertahankan.<sup>61</sup> Dengan semakin menurunnya tingkat pernikahan yang diatur (*miai kekkon*) dan semakin meningkatnya pernikahan berdasarkan cinta (*renai kekkon*), semakin besar pula pandangan yang bersifat “individual oriented” di antara perempuan Jepang. Pandangan ini pada gilirannya turut pula mempengaruhi persepsi mereka terhadap perceraian. Dalam arti, perceraian dianggap sebagai suatu hal yang bersifat pribadi dan tidak melibatkan orang lain atau keluarga. Motonobu (2004) berargumentasi bahwa perubahan persepsi terhadap perceraian ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka perceraian sesudah PD II.

Lebih jauh lagi, kecenderungan meningkatnya pasangan *renai kekkon* mempengaruhi perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 2.3 di bawah ini. Berdasarkan survey (*the 10<sup>th</sup> basic marriage-and-birth trend survey of married couples*), pada tahun 1992, respons terhadap pernyataan, “apakah pasangan yang menikah harus tetap mempertahankan pernikahannya jika ada ketidakcocokan sifat”, menunjukkan bahwa 66.0% responden setuju dengan pernyataan tersebut dan 31.2% responden menyatakan tidak setuju. Pada survey ke-11 (1997) dan ke-12 (2002) dari sumber yang sama, sekitar 50% responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, dan 45% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian, dapat dikatakan terjadi

<sup>60</sup> Sugimoto, *op. cit.*, 172

<sup>61</sup> *Ibid.*

peningkatan jumlah responden yang menyatakan setuju dari 31.2% menjadi 45% terhadap kecenderungan untuk bercerai berdasarkan perubahan persepsi terhadap perceraian, khususnya perempuan. Dengan kata lain, survey ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perubahan persepsi terhadap perceraian yang sangat drastis (Motonobu, 2004: 63).



**Gambar 3.3**

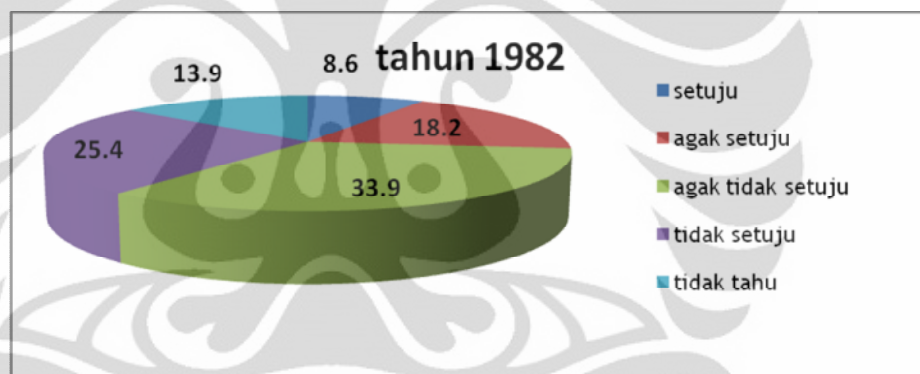
Survey ke 10 (1992), 11 (1997), dan 12 (2002) mengenai pernikahan dan kelahiran dengan respon terhadap pertanyaan, “Apakah pasangan yang menikah harus tetap mempertahankan pernikahannya jika ada ketidakcocokan sifat?”, telah diolah kembali

Sumber: the 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup>, 12<sup>th</sup> basic marriage-and-birth trend survey of married couples tahun 1992, 1997, dan 2002. Catatan: data tahun 1997 sengaja tidak dimasukkan karena selisih angka yang tidak terlalu jauh dengan tahun 2002. Survey ini dilakukan terhadap pasangan suami istri dengan usia istri di bawah 50 tahun.

Temuan di atas juga diperkuat oleh laporan tahunan 1998 Statistik Yudisial oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa alasan ketidakcocokan sifat merupakan motif yang paling penting untuk klaim perceraian di antara suami dan istri. Berlawanan dengan hal itu, alasan ketidakmampuan untuk berbaur dengan baik dengan keluarga ataupun kerabat, yang menjadi penyebab perceraian yang paling sering pada Zaman Meiji justru berada di urutan bawah. Hal ini memperlihatkan bahwa sekarang ini orang bercerai lebih berdasarkan pandangan individu daripada orientasi keluarga.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*

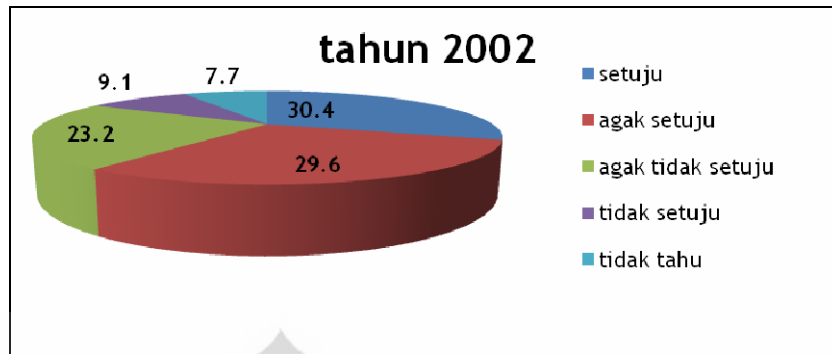
Selanjutnya, berdasarkan survey yang dilakukan terhadap perempuan Jepang berusia 30-70 tahun pada tahun 1982 dan 2002 mengenai persepsi mereka terhadap perceraian sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 di bawah ini, terlihat adanya perubahan yang sangat signifikan. Pada survey tahun 1982, responden perempuan yang menjawab “setuju,” terhadap pernyataan, “walaupun menikah, tetapi jika merasa tidak puas terhadap pasangan, maka lebih baik bercerai,” hanya 8.6% dari total responden. Sedangkan pada survey tahun 2002, responden perempuan yang menjawab “setuju,” terhadap pernyataan, “walaupun menikah, tetapi jika merasa tidak puas terhadap pasangan, maka lebih baik bercerai,” telah mencapai 30.4% dari total responden.



**Gambar 3.4**  
Persepsi Perempuan Jepang Terhadap Pernyataan, “walaupun menikah, tetapi jika merasa tidak puas terhadap pasangan, maka lebih baik bercerai.” Data ini diambil pada tahun 1982 dengan responden perempuan berusia 30 – 70 tahun, telah diolah kembali

Sumber : 内閣府 『男女共同参画社会に関する世論調査』 1982 年実施, telah diolah kembali

<http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-danjo/2-2.html>



**Gambar 3.5**

Persepsi Perempuan Jepang Terhadap Pernyataan, “Walaupun menikah, tetapi jika merasa tidak puas terhadap pasangan, maka lebih baik bercerai.” Data ini diambil pada tahun 2002 dengan responden perempuan berusia 30 – 70 tahun, telah diolah kembali

Sumber: 内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』2002年実施, telah diolah kembali

<http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-danjo/2-2.html>

Dengan demikian, hasil data tahun 2002 mengenai persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian menunjukkan hasil yang sangat jauh berbeda dengan hasil tahun 1982. Responden yang menyatakan “setuju” terhadap pernyataan tersebut meningkat dari yang sebelumnya hanya 8.6% menjadi 30.4%. Sedangkan yang menyatakan “tidak setuju” menurun dari 25.4% menjadi 9.1%. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa perempuan semakin lama menganggap bahwa perceraian merupakan suatu hal yang biasa.

*The National Opinion Survey* yang dilakukan oleh kantor Perdana Menteri Jepang pada tahun 1972, 1982, dan 1992 yang mengangkat masalah “perempuan dan perceraian”, juga memperkuat temuan yang sama. Mereka yang memberikan jawaban positif, yaitu “setuju” dan “agak setuju” terhadap pertanyaan “Apakah diperbolehkan untuk bercerai jika Anda merasa tidak puas dengan pasangan Anda?” mengalami peningkatan dari sekitar 20% menjadi 40% dalam dua dekade antara tahun 1972 dan 1992 (PRS 1972 dan 1992<sup>63</sup>; WAS 1982)<sup>64</sup>. Berdasarkan tahun

<sup>63</sup> Public Relation Section (PRS), Prime Minister’s Office, Value Survey on Women, 1972  
----- Opinion Poll on Gender Equality, 1992

<sup>64</sup> Women’s Affairs Section (WAS), Prime Minister’s Office, 1982. International Comparative Survey on Women’s Issues.

pengambilan survey dan usia responden, responden dengan usia yang lebih muda, yaitu 30 tahun ke bawah, menyatakan sikap yang sangat asertif terhadap perceraian di semua survey yang dilakukan pada tahun 1972 sampai 1992. Tingkat sikap persetujuan terhadap perceraian meningkat secara substansial dari tahun 1982 hingga 1992 bagi seluruh responden. Dengan demikian, perceraian menjadi suatu hal yang semakin biasa di dalam masyarakat pada tahun 1980-an. Pada gilirannya, persepsi terhadap perceraian berubah secara drastis pada tahun 1980-an sampai 1990-an, dan masyarakat Jepang secara umum pun menjadi lebih toleran terhadap perceraian.<sup>65</sup>

Berpijak pada data-data statistik di atas, Motonobu (2004) menegaskan bahwa persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian telah berubah secara signifikan sejak akhir Perang Dunia II. Seperti yang dijelaskan Iwao (1993), “perceraian sekarang lebih mudah karena ini dianggap sebagai masalah pribadi (diantara pasangan itu sendiri), daripada masalah keluarga,” dan pasangan yang bercerai cenderung kurang “menjaga penampilan”.<sup>66</sup> Kemajuan ekonomi yang dimulai oleh industrialisasi Meiji, menyebabkan perubahan struktur keluarga yang kemudian menyebabkan perubahan nilai-nilai terhadap keluarga, anak dan pernikahan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Perubahan nilai-nilai tersebut pada gilirannya menyebabkan perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian. Konsekuensinya, cara hidup setelah Perang Dunia II telah membawa pandangan individualistik, atau “individual oriented” ke dalam masyarakat Jepang, dan masyarakat Jepang telah mulai mengejar kebahagiaannya sendiri dengan cara yang rasional, keluar dari orientasi keluarga atau “family oriented” yang menjadi sebuah nilai yang dominan sebelum PD II. Dalam hal ini, perceraian menjadi sebuah norma sosial dan tidak lagi sebagai sebuah stigma yang bersifat negatif.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Makoto Atoh, “Very Low Fertility in Japan and Value Change Hypotheses,” *Journal of Population Problems*, 53 (1) 1997, 15

<sup>66</sup> Sumiko Iwao, *The Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality*, (New York, 1993), 119

<sup>67</sup> Mukai, *loc. cit.*, 64-65

## **BAB 4**

### **ANALISA PERSEPSI PEREMPUAN JEPANG TERHADAP PERCERAIAN**

Pada Bab II kita sudah melihat bagaimana perubahan struktur keluarga di Jepang juga menyebabkan perubahan nilai-nilai, seperti nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan. Selanjutnya pada Bab III kita telah membahas mengenai persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian yang didahului dengan gambaran perceraian pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Selanjutnya, untuk melihat lebih jelas mengenai perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian, studi ini akan menganalisisnya melalui studi kasus dari tiga orang perempuan Jepang yang mengalami perceraian dengan rentang usia 20-40 tahun.

Sebelum kita melihat studi kasus yang akan dianalisa pada bab ini, perlu kita ingat bahwa ada empat poin penting yang akan menjadi kunci dalam analisa kali ini berdasarkan teori Durkheim, yaitu (1) perubahan struktur keluarga; (2) perubahan nilai-nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan; (3) perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian; dan (4) bagaimana perubahan struktur keluarga dan nilai-nilai tersebut menyebabkan penurunan fungsi integratif yang mempengaruhi persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian dan menyebabkan suatu kondisi tingginya tingkat perceraian.

#### **4.1. Studi Kasus pada Tiga Informan Perempuan Jepang**

(diambil dari buku Kaori H.Okano (*Young Women in Japan*) dan <http://rikon-riyuu.seesaa.net/category/2859521-1.html>)

##### **4.1.1. Studi Kasus pada Informan A**

Yayoi seorang perempuan yang tinggal bersama dengan orang tua, satu orang kakak perempuan, dan satu orang adik laki-lakinya di Kobe. Ia bekerja sebagai karyawan di bagian administrasi. Di tempat Yayoi bekerja, ia bertemu dengan seorang laki-laki pengantar barang yang kebetulan mengantar barang ke tempat Yayoi bekerja dan kemudian berkenalan dan menjalin hubungan. Laki-laki itu bernama Zen. Zen lebih tua delapan

tahun dari Yayoi. Yayoi menikah di usianya yang ke 19 tahun pada tahun 1991. Pernikahan Yayoi dengan Zen dilangsungkan tanpa persetujuan keluarganya yang menganggap bahwa Zen tidak dapat diandalkan dan hanya seorang pengantar barang. Yayoi memutuskan untuk berhenti bekerja karena berpikir bahwa pekerjaan Zen akan bertahan untuk seterusnya, sementara ia tidak.

Akan tetapi pada akhirnya hal ini malah menjadi kesulitan, ketika Zen berhenti bekerja dan menjadi pengangguran pada saat menikah. Baik Yayoi dan Zen berusaha menutupi hal tersebut dan bahkan keluarga Yayoi pun tidak mengetahui hal tersebut. Yayoi menghabiskan seluruh tabungannya untuk membayar biaya pernikahan, termasuk baju pengantin. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah *flat* yang berada dekat dengan rumah orang tua Zen. Pada saat itu, Yayoi berpikir bahwa ia sangat mencintai Zen, yang diyakininya bahwa perasaannya tersebut akan membuat segalanya baik-baik saja.

Awalnya Yayoi mencari pekerjaan sebagai pengalihan dari pekerjaannya yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Ia lalu mendapat pekerjaan paruh waktu. Akan tetapi, situasinya berubah ketika Zen tidak dapat bertahan pada satu pekerjaan untuk waktu yang lama, dan Yayoi menyadari bahwa dirinyalah yang menyokong kehidupan mereka berdua. Kemudian Yayoi juga menyadari bahwa ia dan Zen memiliki masalah finansial. Akan tetapi, Yayoi tidak dapat meminta bantuan pada mertuanya karena ia kurang menyukai mertuanya dan ia juga tidak dapat meminta bantuan pada orang tuanya karena menurutnya harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan itu. Lalu Yayoi juga menyadari kebiasaan Zen yang sering menghamburkan uang untuk kesenangannya, seperti bermain *pachinko* dan minum-minum.

Kemudian Zen mendapat tawaran pekerjaan dari teman ayahnya, Yayoi berusaha membuat Zen kembali bekerja. Setelah itu kehidupannya pun kembali berjalan normal sampai Yayoi mengetahui bahwa Zen menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja. Karena hal itu Yayoi berusaha mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa

mengembalikan uang yang diambil Zen sebelum perusahaan tempat suaminya bekerja mengetahuinya. Akhirnya, ia mendapat pekerjaan di sebuah bar malam. Yayoi berusaha membayar uang yang digelapkan Zen dengan gaji yang ia terima dari bar tempatnya bekerja. Meskipun begitu Zen tetap tidak berubah, bahkan ia mengambil uang dari simpanan mereka berdua.

Pada saat seperti ini Yayoi mendapati bahwa dirinya tengah hamil. Yayoi berpikir bahwa ia tidak bisa terus dalam keadaan seperti ini, ia juga tidak memberitahu Zen mengenai kehamilannya sampai akhirnya ia keguguran. Keguguran inilah yang akhirnya membuat Yayoi memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan berpikir bahwa tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap bertahan. Lalu ia meninggalkan Zen dan pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Baik orang tua Yayoi dan Zen menyerahkan urusan ini pada mereka berdua karena menganggap bahwa orang tua tidak seharusnya ikut campur dalam permasalahan Yayoi dan Zen. Yayoi bercerai pada usia 21 tahun. Setelah itu dia melanjutkan bekerja.

#### **4.1.2. Studi Kasus pada Informan B**

Hatsumi adalah seorang perempuan yang tinggal di daerah *Shitamachi* bersama dengan orangtua, seorang kakak perempuan, dan seorang adik perempuan. Hatsumi bekerja di sebuah perusahaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginannya. Meskipun gaji yang diterimanya cukup untuk kehidupannya, bahkan ia juga dapat memberikan sebagian gajinya pada keluarganya. Akan tetapi, ia tetap tidak merasa senang bekerja di sana.

Pada tahun 1992, ia menikah dengan salah satu teman sekolahnya, Akira, seorang *chef* di restoran Jepang. Mereka menjalin hubungan selama beberapa bulan sampai suatu ketika Hatsumi menyadari kalau dirinya hamil. Ketika itu Hatsumi berpikir bahwa dirinya masih terlalu muda dan bermaksud untuk menggugurkannya. Akan tetapi, Akira memintanya agar jangan menggugurkan bayi itu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk



menikah. Ayah Hatsumi menentang pernikahan tersebut, dan mengatakan bahwa ia seharusnya mencari seorang karyawan kantor biasa (*salaryman*) untuk dijadikan pasangan menikah dan bukannya seorang *chef* seperti Akira.

Meskipun ayahnya tidak setuju, Hatsumi pada akhirnya tetap menikah dengan Akira di usianya yang ke-21 tahun, dan itu baru sekitar 3 bulan dari awal ia berhubungan dengan Akira. Setelah menikah mereka berdua pindah ke modern *flat* di dekat tempat ibu Akira tinggal. Menurut Hatsumi keluarga Akira termasuk keluarga yang kaya dan memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dirinya. Setelah menikah Hatsumi tetap meneruskan pekerjaannya, akan tetapi hanya sampai satu bulan sebelum ia melahirkan. Ia bekerja *full-time*. Akira sebenarnya tidak suka melihat Hatsumi, yang menurutnya hanya pekerja biasa, harus bekerja dalam jangka waktu yang lama.

Setelah beberapa lama menikah, Hatsumi merasa bahwa ia mengalami apa yang disebutnya "*marriage blues*". Dia menjadi mudah menangis terhadap hal-hal kecil. Ia juga merasa tidak nyaman melihat kondisi fisiknya dengan perut yang membesar. Dan ia berharap agar masalah ini dapat terselesaikan dan ketidaknyamanan yang ia alami dengan keluarga Akira juga dapat hilang ketika anaknya lahir nanti.

Hatsumi mengalami kelahiran yang sulit. Akan tetapi, ia berhasil melahirkan bayinya dengan selamat dan diberi nama Maki. Baik Akira dan mertuanya merasa bahagia. Akan tetapi, kelahiran anaknya bukan merupakan solusi dari ketidakbahagiaan Hatsumi. Setelah melahirkan, ia menderita apa yang disebutnya "*baby blues*".

Hatsumi tidak pandai dalam pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Akira ingin membantu, tetapi Hatsumi melarangnya. Akira memang pandai dalam hal pekerjaan rumah tangga dan ia sering mengeluh mengenai buruknya kemampuan Hatsumi. Hatsumi tidak ingin Akira membantunya karena biasanya setelah membantunya Akira akan menceritakannya kepada orang lain, dan karena itu Hatsumi tidak ingin Akira membantunya. Dia juga merasa bahwa mertuanya selalu

memperhatikannya dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Hatsumi juga sering bertengkar dengan anaknya yang baru berusia dua tahun.

Ketika Hatsumi terbebani dengan perasaan negatifnya terhadap pekerjaan rumah, anaknya, dan mertuanya, ayahnya meninggal karena kanker. Setelah satu bulan kematian ayahnya, terjadi gempa bumi, rumah Hatsumi dan mertuanya selamat. Akan tetapi, rumah orang tua Hatsumi hancur. Akhirnya Hatsumi mengajak keluarganya untuk tinggal sementara di *flat*nya. Hal ini membuat mertuanya tidak suka dan mengatakan kepada Akira bahwa ia menikahi keluarga! Mengetahui hal itu, Hatsumi kehilangan rasa hormatnya terhadap suami dan mertuanya. Setelah beberapa bulan, keluarga Hatsumi memutuskan untuk pindah ke rumah yang disediakan pemerintah untuk korban bencana.

Hatsumi memutuskan untuk bekerja paruh waktu dan itu membuatnya harus menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Selain itu, Akira juga sering berpergian jarak jauh yang membuat Hatsumi sulit menemuinya dan ini mempengaruhi hubungan mereka. Hatsumi merasa senang dengan pekerjaannya.

Suatu hari ia pergi dengan koleganya, seorang laki-laki yang bersimpati terhadap penderitaannya. Akira mengetahuinya dan sangat marah. Kemudian Akira menyuruh ibunya untuk membawa anaknya dan memberitahu ibu Hatsumi untuk membawa Hatsumi pulang. Akira juga memberitahunya bahwa kalau ia ingin bercerai maka Akira akan mengurusnya. Mendengar hal itu Hatsumi sangat kaget dan merasa kalau ia tidak bisa lagi hidup bersama orang seperti itu sampai akhirnya ia memutuskan untuk bercerai. Pada saat itu ia tidak terpikir mengenai anaknya, yang ia pikirkan adalah apa yang akan terjadi dengan pernikahannya. Hal inilah yang kemudian ia sesali.

Akhirnya mereka bercerai dan Hatsumi kehilangan hak asuh anaknya. Hatsumi merasa bersalah karena ia tidak dapat bertemu dengan anaknya. Pada saat itu usia Hatsumi 26 tahun. Setelah itu Hatsumi kembali bekerja dan masih berharap dapat bertemu dengan anaknya.

#### 4.1.3. Studi Kasus pada Informan C

Sayo adalah seorang perempuan berusia 34 tahun. Ia seorang karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang periklanan di Tokyo. Sudah sekitar 4 tahun dia tinggal terpisah dari orang tuanya yang berada di Hokkaido untuk urusan pekerjaan. Sayo memiliki seorang adik perempuan yang masih bersekolah dan tinggal bersama kedua orang tuanya.

Suatu hari Sayo mengikuti sebuah pertemuan yang diatur oleh teman kerjanya. Di pertemuan itulah ia berkenalan dengan Jun seorang karyawan dari perusahaan lain yang juga mengikuti pertemuan tersebut. Hubungan Sayo dan Jun pun berlanjut sampai akhirnya mereka memutuskan menikah setelah menjalani hubungan selama 6 bulan. Saat itu Sayo merasa bahwa Jun adalah laki-laki yang baik, bertanggungjawab, berprinsip, dan juga memiliki penghasilan yang terbilang mencukupi.

Kemudian Sayo pun pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia akan segera menikah. Begitu juga dengan Jun yang mengabari ibunya yang tinggal di Kyoto dan memang sudah menjadi janda setelah ditinggal suaminya karena sakit. Mereka pun melangsungkan pernikahan tanpa ada hambatan yang berarti.

Karena Jun merupakan anak laki-laki satu-satunya, maka setelah menikah Jun merasa harus mengurus ibunya yang seorang janda dan mengajaknya untuk tinggal bersama dengan Sayo dan Jun. Semenjak mertuanya tinggal bersama, Sayo merasa bahwa ibu mertuanya itu adalah orang yang selalu ingin segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diinginkannya, seperti halnya pekerjaan rumah tangga.

Karena setelah menikah Sayo memutuskan untuk tetap bekerja, maka pekerjaan rumah pun sering kali harus dikerjakan dengan cepat dan memang terkadang terlihat seperti asal-asalan. Bagi Sayo dan suaminya hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah besar. Akan tetapi, mertua Sayo sering sekali mengkritiknya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik.

Pernah suatu hari, Sayo sedang sibuk dengan pekerjaan kantor dan terpaksa harus menunda mengerjakan pekerjaan rumahnya. Suaminya,

Jun, yang kebetulan sedang berada di rumah memutuskan untuk membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah yang belum sempat dikerjakan Sayo. Mengetahui hal itu, mertua Sayo sangat marah dan terus saja menyalahkan Sayo karena setelah menikah tidak berhenti bekerja dan menjadi istri yang hanya tinggal di rumah dan mengurus suaminya. Menurut ibu mertuanya membuat seorang suami yang sudah bekerja di luar sampai harus membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang harusnya menjadi tanggungjawab seorang istri adalah sebuah perbuatan yang memalukan. Pada saat itu Sayo memang merasa bersalah pada suaminya. Akan tetapi, setelah itu pun ibu mertuanya masih saja mengkritik dirinya baik sebagai seorang istri ataupun perempuan.

Hal yang paling ia tidak sukai adalah ketika ibu mertuanya itu membandingkan Sayo dengan ibu mertuanya sendiri dalam hal mengurus rumah dan juga suami. Sebenarnya Sayo merasa tidak perlu terlalu memikirkan perkataan ibu mertuanya itu, akan tetapi karena terus menerus dikritik Sayo pun merasa sedih dan marah. Tanpa memberitahu suaminya, Sayo memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Hokkaido.

Sayo sempat merasa heran karena sudah seminggu lebih ia pergi, tetapi suaminya tidak menghubungi atau mencarinya sama sekali. Akhirnya dengan perasaan enggan Sayo menghubungi suaminya. Awalnya saat ditelepon suaminya tidak pernah menjawab. Sampai sekitar 3 minggu suaminya tidak dapat dihubungi. Dengan perasaan kecewa Sayo pun akhirnya berpikir untuk berpisah dengan suaminya yang sudah tidak mempedulikannya. Sayo pun memutuskan untuk mendatangi tempat tinggalnya yang dulu.

Pada saat itu ia berhasil menemui suaminya yang baru saja pulang dari kantor. Sayo pun langsung mengajak bicara suaminya tersebut dan menanyakan alasannya tidak menghubungi dirinya. Saat itu suaminya memberikan jawaban yang membuat Sayo terkejut. Suaminya berkata bahwa tidak seharusnya Sayo pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan ibu mertuanya. Jun merasa bahwa memang Sayo yang

bersalah dan seharusnya mendengarkan perkataan ibu mertuanya itu. Mendengar perkataan Jun, Sayo menyadari bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan hidupnya bersama Jun dan memberitahu Jun bahwa lebih baik mereka bercerai. Pada saat itu, Jun sedikit menunjukkan kekagetannya, tetapi setelah beberapa saat terdiam, akhirnya dia menyetujui permintaan Sayo. Setelah itu mereka bersama sepakat untuk mengakhiri pernikahannya dan karena mereka tidak memiliki anak, maka proses yang dilalui pun relatif mudah.

#### 4.2 Teori Struktural Fungsional Durkheim

Studi ini akan menggunakan teori struktural fungsional Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat merupakan sistem yang cerdas, yang dapat mengatur kebutuhannya sendiri, dan membuat perubahan agar tetap seimbang. Kebutuhan dari sistem itu sendiri yang membawa perubahan. Pada saat terjadi perubahan dalam masyarakat, seperti halnya industrialisasi ataupun pertumbuhan populasi yang cepat, maka aspek-aspek sosial atau sistem dalam masyarakat akan turut berubah untuk mempertahankan fungsinya serta menjaga keseimbangan. Sebagai contoh, yaitu sistem dalam masyarakat salah satunya struktur keluarga.

Ketika perubahan ini terjadi, terbentuk sistem yang mendukung perubahan tersebut dan juga sistem yang justru tidak dapat mendukung perubahan tersebut. Sistem yang mendukung akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sedangkan sistem yang tidak mendukung mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi itu sendiri. Penurunan fungsi yang terjadi pada sistem ini mengakibatkan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan fungsinya dan tercerai-berai. Pada gilirannya penurunan fungsi ini akan menyebabkan dampak sosial.

Dalam konteks masyarakat Jepang, industrialisasi dan modernisasi yang terjadi sejak Zaman Meiji dan kemajuan ekonomi setelah Perang Dunia II membawa banyak perubahan dalam masyarakat Jepang, salah satunya yaitu pada struktur keluarga Jepang. Jepang yang pada Zaman Meiji sangat kental dengan ideologi *Ie* dalam sistem keluarganya dan dikenal dengan istilah *chokkei kazoku* atau keluarga dimana tiga generasi hidup bersama di bawah satu atap, setelah Perang Dunia II berubah menjadi *kaku kazoku* atau keluarga batih. Terjadinya

perubahan ini disebabkan sistem keluarga (*chokkei kazoku*) yang ada pada masyarakat saat itu dianggap sudah tidak dapat menunjang segala perubahan yang terjadi, sehingga masyarakat membutuhkan sistem yang dianggap lebih sesuai (*kaku kazoku*) dengan perubahan tersebut.

Talcott Parsons menyatakan bahwa industrialisasi mengubah sistem sosial dan juga hubungan kekerabatan. Keluarga menjadi lebih spesifik dan anggota keluarga menjadi pencari nafkah. Menurut Parsons, struktur keluarga batih dianggap lebih sesuai dengan keadaan masyarakat selama industrialisasi. Keluarga batih dianggap memiliki mobilitas yang tinggi dibandingkan dengan keluarga luas. Kemampuan masing-masing individu yang memiliki spesialisasi pada bidang-bidang tertentu sangat sesuai dengan masa industrialisasi dimana setiap individu dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi. Keluarga batih juga lebih cocok dengan prinsip merokrasi (hubungan yang lebih sedikit dengan keluarga). Struktur keluarga ini dianggap sangat efektif bila dibandingkan dengan struktur keluarga pada pra-industrialisasi.

Akan tetapi perubahan yang terjadi dalam struktur keluarga Jepang yang sebelumnya *chokkei kazoku* menjadi *kaku kazoku* ini menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai, seperti nilai terhadap keluarga, anak, pernikahan, dan perceraian. Kemudian nilai-nilai ini menyebabkan perubahan persepsi masyarakat, khususnya perempuan, terhadap perceraian, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat perceraian di Jepang. Dalam studi ini penurunan fungsi integratif keluarga yang pada gilirannya menyebabkan tingginya tingkat perceraian di Jepang setelah PD II.

Sebelum kita menganalisis studi kasus di atas, perlu kita ingat bahwa ada empat poin penting yang akan menjadi kunci dalam analisa kali ini berdasarkan teori Durkheim, yaitu (1) perubahan struktur keluarga; (2) perubahan tata nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan; (3) perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian; dan (4) bagaimana perubahan struktur keluarga dan nilai-nilai tersebut menyebabkan penurunan fungsi integratif yang mempengaruhi persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian dan pada akhirnya menyebabkan suatu kondisi tingginya tingkat perceraian.

### 4.3 Analisa Studi Kasus Berdasarkan Teori Durkheim

#### 4.3.1 Analisa Informan A pada Studi Kasus 1

Informan A pada studi kasus 1 jelas hidup dalam struktur keluarga *kaku kazoku*, yang menjadi struktur keluarga yang paling dominan dalam masyarakat Jepang pada masa itu. Kemudian informan A memutuskan untuk menikah meskipun tanpa persetujuan orang tua. Hal memperlihatkan bahwa pernikahan dalam struktur keluarga *kaku kazoku* tidak lagi dipandang sebagai keputusan yang membutuhkan persetujuan keluarga, melainkan berdasarkan keputusan masing-masing pribadi. Informan A memutuskan untuk berhenti bekerja setelah menikah. Disini terlihat bahwa informan A berpikir bahwa suaminya adalah yang bertugas mencari nafkah dan tugasnya adalah mengurus keluarga. Meskipun pada akhirnya, ia juga harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga.

Lebih lanjut, tindakan informan A yang sesudah menikah lebih memilih untuk menyewa *flat* dan hidup terpisah dari orang tuanya, menunjukkan bahwa dirinya melanjutkan struktur keluarga *kaku kazoku* dimana dalam struktur keluarga *kaku kazoku* hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Sehingga bagi anak yang sudah menikah akan meninggalkan rumah orang tuanya. Ketika informan A menyadari dirinya sedang hamil dan akhirnya mengalami keguguran, hal itu justru membuatnya berpikir bahwa tidak ada lagi alasan untuk tetap bertahan. Tindakan informan A yang memutuskan untuk meninggalkan Zen dan bercerai, menunjukkan bahwa dengan tidak adanya keberadaan anak dalam pernikahan lebih memudahkan perempuan untuk bercerai karena mereka menganggap bahwa tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Seperti halnya pernikahan, perceraian juga menjadi keputusan dari individu yang menikah.

#### 4.3.2 Analisa Informan B pada Studi Kasus 2

Informan B pada studi kasus 2 juga telah hidup dalam struktur keluarga *kaku kazoku*, hal ini terlihat pada bagian cerita yang menunjukkan bahwa informan B tinggal bersama dengan orang tua, kakak

perempuan, dan adik perempuannya. Setelah menikah, informan B memilih untuk tinggal terpisah dari orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa informan B juga menerapkan struktur keluarga *kaku kazoku* untuk keluarganya. Kemudian seperti halnya yang terjadi dengan informan A dalam studi kasus 1, dimana pernikahannya tidak mendapat persetujuan dari orang tua. Informan B menunjukkan sikap yang sama. Ini terlihat pada saat informan B tetap memutuskan untuk menikah, meskipun tidak disetujui. Dapat dikatakan bahwa dalam struktur keluarga *kaku kazoku*, pernikahan tidak lagi menjadi hal yang ditentukan oleh keluarga, melainkan berdasarkan keputusan individu yang bersangkutan.

Setelah menikah, informan B memutuskan untuk terus bekerja, tetapi hanya sampai satu bulan sebelum melahirkan. Setelah itu ia hanya akan bekerja paruh waktu dan mengurus keluarganya. Keputusan informan B untuk tetap bekerja meskipun paruh waktu menunjukkan bahwa informan B lebih memilih untuk bekerja paruh waktu daripada menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya.

Pada bagian dimana informan B merasa terbebani dengan perasaan negatif terhadap anaknya, menunjukkan bahwa nilai anak mengalami perubahan. Keberadaan anak yang dirasakan sangat penting dalam struktur keluarga *chokkei kazoku* berubah menjadi beban dalam struktur keluarga *kaku kazoku*. Lebih jauh lagi, perubahan nilai anak terlihat pada saat informan B bercerai, ia hanya memikirkan nasib pernikahannya dan melupakan anaknya. Ini menunjukkan bahwa informan B lebih memikirkan nasibnya sendiri (individual). Informan B yang akhirnya memutuskan untuk bercerai memperlihatkan bahwa perempuan memandang perceraian sebagai suatu hal yang biasa.

#### **4.3.3 Analisa Informan C pada Studi Kasus 3**

Seperti halnya informan A dan B, informan C juga telah hidup dalam struktur keluarga *kaku kazoku*. Ini ditunjukkan bahwa informan C tinggal bersama orang tua dan adiknya sebelum akhirnya pindah ke Tokyo untuk bekerja. Setelah menikah pun informan C memilih untuk tinggal



terpisah dari orang tuanya. Informan C juga menganggap pernikahan sebagai suatu hal yang diputuskan oleh dirinya sendiri. Perbedaan antara informan C dengan informan A dan B ditunjukkan pada saat setelah menikah informan C tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai karyawan kantor. Sedangkan informan A dan B memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dan menjadi istri, meskipun dalam masing-masing studi kasus informan A dan B melakukan pekerjaan *part-time* untuk membantu keuangan keluarga.

Ketika mertua informan C ikut tinggal bersama, menunjukkan bahwa bagi mertua informan C, tinggal bersama dengan anaknya laki-lakinya yang sudah menikah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Hal ini seperti yang tergambar dalam struktur keluarga *chokkei kazoku*. Perselisihan yang terjadi antara informan C dengan ibu mertuanya, yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian bagi informan C dengan suaminya, memperlihatkan pola yang sama pada perceraian dalam struktur keluarga *chokkei kazoku*. Pola tersebut merujuk pada alasan umum orang bercerai dalam struktur keluarga *chokkei kazoku* yaitu, perceraian yang diakibatkan ketidakharmonisan hubungan antara ibu mertua dengan menantu perempuannya. Akan tetapi, ketika informan C meminta untuk bercerai, menunjukkan bahwa persepsi informan C terhadap perceraian berubah. Informan C yang merasa tidak dapat melanjutkan pernikahannya memilih untuk bercerai.

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa ketiga informan yang hidup dalam struktur keluarga *kaku kazoku* memiliki pandangan yang berbeda mengenai nilai-nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan dengan mereka yang hidup dalam struktur keluarga *chokkei kazoku*. Ketiga informan dalam studi kasus di atas menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang tidak biasa.

Berikut ini adalah beberapa informasi tambahan yang berupa kutipan dari beberapa perempuan yang bercerai dari sejumlah forum diskusi resmi mengenai perceraian.

### Kutipan 1

a. 私が離婚という言葉をはじめて口にしたとき、主人は鼻で笑ってまるで本気にしていませんでした。

でも、先生に教わった魔法

の言葉を一つ二つと話し始めたら・・・

こんなにうまくいくなんて、ほんとうに信じられません。

主人とお義母さんの態度が180度変わりました。

不安だった離婚後の生活費にも困らないし、やっと自由になりました。先生、ほんとうにありがとうございました。

【東京都町田市在住 S様 女性 専業主婦】

#### Terjemahan:

Pada saat pertama kali saya mengucapkan kata “bercerai”, suami saya tertawa terbahak-bahak seolah-olah saya tidak serius mengatakan hal tersebut. Akan tetapi, ketika saya mengatakan sepatah dua patah kata yang telah diajarkan Sensei (dalam hal ini memberikan saran), saya merasa tidak percaya bahwa ini akan berhasil. Sikap suami dan ibu mertua saya pun berubah 180 derajat. Kemudian kekhawatiran saya mengenai biaya hidup setelah bercerai pun ternyata tidak begitu menyulitkan, dan akhirnya saya bisa mendapatkan kebebasan. Terima kasih banyak Sensei.

(Nyonya S, Ibu Rumah Tangga yang tinggal di daerah Machidashi, Tokyo)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa perceraian dipandang sebagai sebuah kebebasan. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi perempuan perceraian dapat dipandang sebagai suatu hal yang positif, seperti halnya kebebasan.

### Kutipan 2

b. 全てを放棄してただただ離婚だけを考えていました。

でも、見かたを変えれば、夢も希望も新たな目的も持てるって

わかりました。  
 私も息子もまだまだ長い人生ですものね。  
 先生の暖かいことばが胸にしみました。

【埼玉県 専業主婦 34歳 女性】

Terjemahan:

Saya tidak memikirkan hal lain kecuali perceraian. Akan tetapi, setelah saya mengubah cara pandang saya, maka saya menjadi mengerti bahwa mimpi, harapan, dan tujuan baru sedang menanti. Saya dan anak saya pun masih memiliki kehidupan yang panjang. Kata-kata Sensei sangat berkesan dalam hati.

(Perempuan, 34 tahun, Ibu Rumah Tangga, tinggal di Saitama)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa perempuan yang bercerai ini awalnya hanya memikirkan mengenai perceraian saja. Kemudian setelah berdiskusi dengan sensei yang memang ahli dalam membantu masalah-masalah seperti ini, pada akhirnya membuat ibu ini menyadari bahwa dibalik masalah perceraianya, masih ada mimpi dan harapan baru yang menantinya beserta anaknya. Dalam hal ini, perempuan ini melihat perceraian lebih ke arah positif, dimana setelah bercerai ia masih bisa mewujudkan mimpi-mimpi dan harapannya bersama anaknya, meskipun tanpa kehadiran suami disisinya.

### Kutipan 3

- c. 弁護士さんの所に行っても何かしっくりとこない、胸につかえるものが残っていましたが、  
 先生のお話を聞いて、不安な気持ちがなくなり感謝しています。  
 私はやっとのことで<sup>かていさいばんしょ</sup>家庭裁判所  
 へ行き、調停という1歩を踏み出しました。  
 今までとは違う私です。絶対に離婚します。

ここで先生に出会えたことにほんとうに感謝しています。

【東大阪市 会社経営手伝い 30歳 女性】

Terjemahan:

Meskipun saya pergi ke tempat pengacara pun, akan tetapi masih merasa tidak yakin, seperti masih ada yang mengganjal di hati. Tetapi setelah mendengar nasehat Sensei, saya berterima kasih karena kekhawatiran saya hilang. Pada akhirnya saya pergi ke pengadilan dan sudah mengambil sebuah langkah untuk bermediasi. Saya yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Saya harus bercerai. Saya sangat bersyukur dapat bertemu dengan Sensei.

(Perempuan, 30 tahun, membantu manajemen sebuah perusahaan, tinggal di Higashi, Osaka)

Kutipan di atas menyatakan bahwa perempuan tersebut ingin memberitahu bahwa dirinya sudah berbeda dari dirinya yang dulu. Selain itu, kutipan tersebut juga menunjukkan secara jelas pada bagian “絶対に離婚します”, bahwa perempuan tersebut mengatakan bahwa dia harus bercerai, dan hal ini juga mengindikasikan bahwa perceraian tidak lagi menjadi suatu stigma di kalangan masyarakat, khususnya perempuan. Sehingga ketika seorang perempuan merasa tidak lagi dapat meneruskan kehidupan pernikahannya, maka lebih baik ia bercerai.

## BAB 5

### KESIMPULAN

Angka perceraian di Jepang mengalami peningkatan sesudah Perang Dunia II. Tepatnya tahun 1960-an, perceraian mengalami peningkatan yang signifikan. Angka perceraian mencapai titik baliknya yaitu, 0.73 per 1,000 populasi pada tahun 1963 dan mencapai puncaknya di tahun 1980-an. Sejak saat itu angka perceraian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2002 mencapai angka 2.30 per 1,000 populasi.

Berpijak pada teori structural fungsional Durkheim, studi ini berargumentasi bahwa perubahan struktur keluarga Jepang dari *chokkei kazoku* menjadi *kaku kazoku* menyebabkan perubahan nilai-nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan. Perubahan nilai-nilai tersebut menyebabkan perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian setelah Perang Dunia II. Perubahan persepsi inilah yang pada akhirnya turut mempengaruhi tingkat perceraian di Jepang. Dengan adanya perubahan struktur keluarga dan nilai-nilai tersebut yang mengakibatkan penurunan fungsi integrative keluarga dan mempengaruhi persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian. Perubahan persepsi ini pada akhirnya mempengaruhi tingginya tingkat perceraian.

*Chokkei kazoku* menjadi struktur keluarga yang paling dominan pada Zaman Meiji. Struktur keluarga ini biasanya terdiri dari tiga generasi, kakek-nenek, ayah-ibu, dan anak. *Chokkei kazoku* menerapkan sistem *Ie* yang pada gilirannya mempengaruhi nilai-nilai yang mengatur perikehidupan setiap keluarga, khususnya nilai keluarga, anak, dan pernikahan.

Dalam konteks nilai keluarga, setiap anggota sebuah *Ie* wajib menjaga keberlangsungan *Ie* tersebut. Dalam konteks nilai anak, keberadaan anak sangat penting, dan anak dianggap bernilai produktif.

Dalam konteks nilai pernikahan, pernikahan dianggap sebagai kebahagiaan utama bagi seorang perempuan. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai dasar dari “stabilitas ekonomi”. Pernikahan menjadi suatu hal yang melibatkan keluarga. Pernikahan yang diatur (*miai kekkon*) menjadi hal yang biasa di antara masyarakat Jepang pada saat itu. Pada Zaman Meiji ini tingkat

perceraian yang dipengaruhi sistem *Ie* menunjukkan angka yang rendah. Tingkat perceraian yang rendah ini bertahan sampai setelah PD II, yaitu sekitar tahun 1950-an.

Setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1946, *Meiji Minpou* dihapus dan diganti dengan Konstitusi baru yang dibuat berdasarkan prinsip demokrasi dan individualisme, dan dikenal dengan istilah *Nihon Koku Kenpou*. Prinsip demokrasi dan individualism diartikan dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, perlindungan dari diskriminasi, dan kesetaraan jender menjadi hal yang utama.

Dihapuskannya *Meiji Minpou*, perubahan masyarakat agraris menjadi industrialis, terjadinya urbanisasi, terbukanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya perempuan, menyebabkan perubahan struktur keluarga *chokkei kazoku* berubah menjadi *kaku kazoku*. Pada gilirannya perubahan struktur keluarga ini menyebabkan perubahan terhadap nilai keluarga, anak, dan pernikahan setelah PD II.

Dengan demikian, dapat secara singkat disimpulkan bahwa industrialisasi dan kemajuan ekonomi menyebabkan perubahan pada struktur keluarga Jepang setelah PD II. Pada gilirannya, perubahan struktur keluarga ini menyebabkan perubahan terhadap nilai keluarga, anak, dan pernikahan. Nilai keluarga berubah dari yang sebelumnya bersifat *family oriented* menjadi *individualistic oriented*. Nilai anak, berubah dari yang sebelumnya anak bernilai produktif menjadi bernilai konsumtif dan keberadaan seorang anak tidak lagi dianggap penting dalam suatu keluarga. Demikian pula halnya dengan nilai pernikahan. Pernikahan yang sebelumnya dianggap sebagai kebahagiaan utama seorang perempuan dan stabilitas ekonomi, setelah PD II dianggap tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia bagi seorang perempuan dan juga pernikahan tidak lagi menjadi keputusan yang melibatkan keluarga, melainkan berdasarkan keputusan individu itu sendiri. Perubahan nilai-nilai ini pada akhirnya menyebabkan perubahan terhadap persepsi perempuan Jepang setelah PD II. Perubahan persepsi terhadap perceraian ini pada gilirannya mempengaruhi tingginya tingkat perceraian di Jepang setelah PD II.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allan, Kenneth. (2005). *Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World*. Greensboro: University of North Carolina.
- Atoh, Makoto. (2001). "Very Low Fertility in Japan and Value Change Hypotheses." *Review of Population and Social Policy* 10: 1-21.
- Fukutake, T. (1982). *The Japanese Social Structure*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Inglehart, R dan Baker, W. E. (2000). Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. *American Sociology Review* 65(1): 19-51
- Iwao, Sumiko. (1993). *The Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality*. New York: Free Press.
- Kurosu, Satomi. (2011). "Divorce in Early Modern Rural Japan: Household and Individual Life Course in Northeastern Villages, 1716-1870." *Journal of Family History* 36(2): 118-141.
- Lebra, Takie Sugiyama. (1984). *Japanese Women: Constraint and Fulfillment*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Ministry of Health, Labour and Welfare. (2004). Statistical Database of Ministry of Health, Labour and Welfare [On-line Database]. Tersedia di: <http://www.dtbk.mhlw.go.jp/toukei/index.html>.
- Ministry of Health, Labour and Welfare. (2000). Statistics on Divorce [Special Report in Vital Statistics of Japan]. Tersedia di: [http://www1.mhlw.go.jp/toukei/rikon\\_8/index.html](http://www1.mhlw.go.jp/toukei/rikon_8/index.html).
- Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistics Bureau, Statistical Research and Training Institute, MPHPT. (2000). Statistical handbook of Japan 2004. Tersedia di: <http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm>.
- Motonobu, Mukai. (2004). *Modernization and Divorce in Japan*. Marshall University.
- National Institute of Population and Social Security Research. (2003). Population statistics of Japan 2003. Research Report, 9.

- National Institute of Population and Social Security Research. (1997). *Dai 11 kaishusseidoukokihonchosa* [The 11<sup>th</sup> basic marriage-and-birth trend survey]. Tersedia di: <http://www.ipps.go.jp/>.
- National Institute of Population and Social Security Research. (2002). *Dai 12 kaishusseidoukokihonchosa* [The 12<sup>th</sup> basic marriage-and-birth trend survey]. Tersedia di: <http://www.ipps.go.jp/>.
- Nishioka, Hachiro, dkk. (2012). Household Changes in Contemporary Japan: Overview of the Result of the Sixth National Survey on Household Changes (2009). *The Japanese Journal of Population* 10(1): 32-59.
- Ochiai, Emiko. (1997). *The Japanese Family System in Transition: A Sociological Analysis of Family Change in Postwar Japan*. Tokyo: LTCB International Library Selection.
- Okano, Kaori H. (2009). *Young Women in Japan: Transitions to Adulthood*. New York.
- Ono, Hiroshi. (2006). *Divorce in Japan: Why It Happens, Why It Doesn't*. Sweden.
- Smith, S. R. (2000). Land of the rising son?: Domestic Organization, ancestor worship, and economic change in Japan. In S. K. Houseknecht, & J. G. Pankhurst (Eds.), *Family, Religion, and Social Change in Divorce Societies*. (hal. 305-323). New York: Oxford University Press.
- Sugimoto, Yoshio. (2003). *An Introduction to Japanese Society*. UK: Cambridge University Press.
- Teruko, Inoue dan Yumiko, Ehara. (1990). *Josei no DeetaBukku*. (Ed. ke- 1). Tokyo: Yuhikaku.
- Teruko, Inoue dan Yumiko, Ehara. (2005). *Josei no DeetaBukku*. (Ed. ke- 4). Tokyo: Yuhikaku.
- Toshiaki, Tachibanaki. (2010). *The New Paradox for Japanese Women: Greater Choice, Greater Inequality*. Tokyo: LTCB International Library Trust/International House of Japan.
- Trommdorff, Gisela. (2009). Value Change in Japan. *International Journal of Intercultural Relations* 7(4): 337-360.



Winther, Jennifer A. (2008). "Household Enumeration in National Discourse: Three Moments in Modern Japan History." *Social Science History Association*: 1-46.

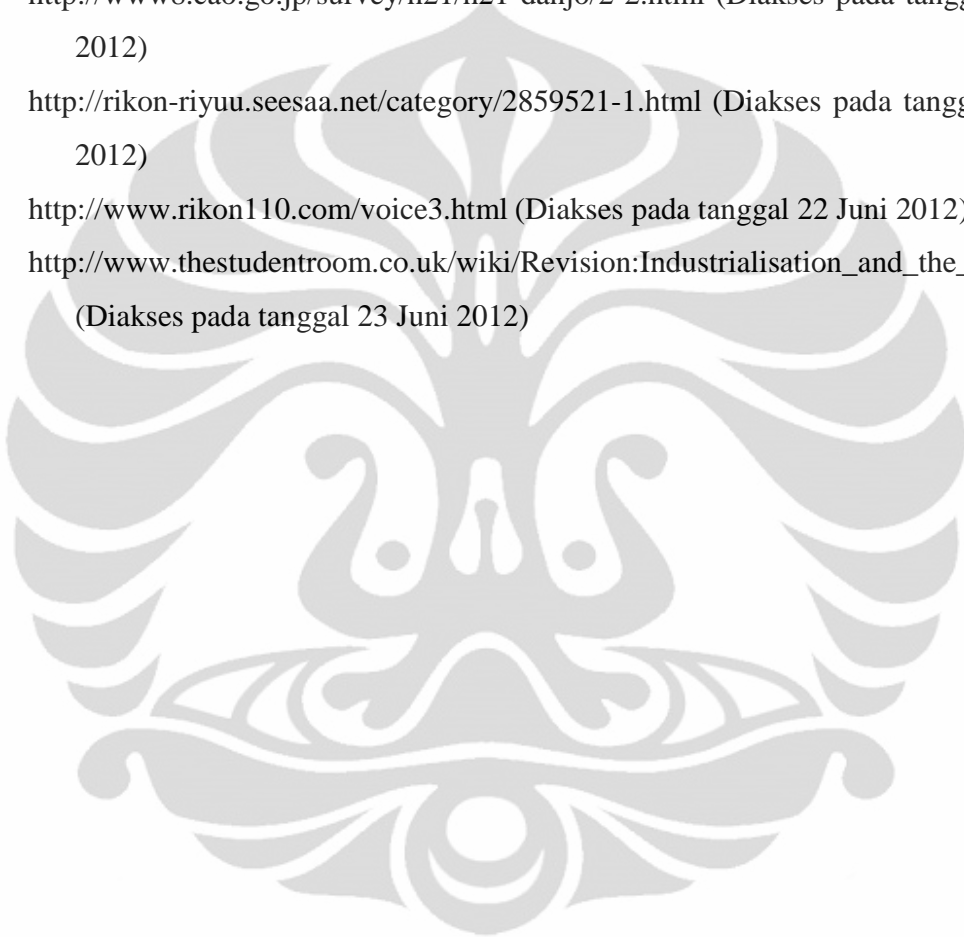
**Internet**

<http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-danjo/2-2.html> (Diakses pada tanggal 19 Juni 2012)

<http://rikon-riyuu.seesaa.net/category/2859521-1.html> (Diakses pada tanggal 22 Juni 2012)

<http://www.rikon110.com/voice3.html> (Diakses pada tanggal 22 Juni 2012)

[http://www.thestudentroom.co.uk/wiki/Revision:Industrialisation\\_and\\_the\\_Family](http://www.thestudentroom.co.uk/wiki/Revision:Industrialisation_and_the_Family) (Diakses pada tanggal 23 Juni 2012)



Tahun	Number										Proporsi (%)			Tingkat perceraian (per 1,000 populasi)
	Total angka pencerai an	Perce- raian berdasar- kan konsiliasi bersama	Perce- raian berdasar- kan konsiliasi	Perce- raian berdasar- kan penyesuaian	Perce- raian berdasar- kan kompromi	Perce- raian berdasar- kan pengakuan klaim	Perce- raian berdasar- kan putusan pengadilan	Perce- raian berdasar- kan keputusan bersama (yogi rikon)	Perce- raian berdasar- kan konsiliasi (chotei rikon)	Perce- raian berdasar- kan penyesuaian (shinpan rikon)	Perce- raian berdasar- kan putusan pengadilan (salban rikon)			
1883	127,163	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.38
1890	109,088	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.73
1900	63,828	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.46
1910	59,432	59,019	...	...	...	...	...	...	...	...	413,99.3	...	...	1.21
1920	55,511	55,061	...	...	...	...	...	...	...	...	450,99.2	...	...	1.00
1925	51,687	51,315	...	...	...	...	...	...	...	...	372,99.3	...	...	0.87
1930	51,259	50,881	...	...	...	...	...	...	...	...	378,99.3	...	...	0.80
1935	48,528	48,134	...	...	...	...	...	...	...	...	394,99.2	...	...	0.70
1940	48,556	48,187	...	...	...	...	...	...	...	...	369,99.2	...	...	0.68
1947	79,551	79,415	...	...	...	...	...	...	...	...	136,99.8	...	...	1.02
1950	83,689	79,955	3,276	25	...	...	...	...	...	...	433,95.5	3.9	0.0	1.01
1955	75,267	69,839	4,833	27	...	...	...	...	...	...	568,92.8	6.4	0.0	0.85
1960	69,410	63,302	5,413	43	...	...	...	...	...	...	652,91.2	7.8	0.1	0.75
1965	77,195	69,599	6,692	41	...	...	...	...	...	...	863,90.2	8.7	0.1	0.79
1966	79,432	71,168	7,314	41	...	...	...	...	...	...	909,89.6	9.2	0.1	0.81
1967	83,478	74,843	7,719	62	...	...	...	...	...	...	854,89.7	9.2	0.1	0.84
1968	87,327	78,181	8,177	85	...	...	...	...	...	...	884,89.5	9.4	0.1	0.87
1969	91,280	81,883	8,391	84	...	...	...	...	...	...	922,89.7	9.2	0.1	0.90
1970	95,937	85,920	8,960	64	...	...	...	...	...	...	993,89.6	9.3	0.1	0.93
1971	103,595	92,892	9,576	57	...	...	...	...	...	...	89.7	9.2	0.1	0.99
1972	108,382	97,068	10,175	69	...	...	...	...	...	...	1,070	9.4	0.1	1.02
1973	111,877	100,353	10,325	69	...	...	...	...	...	...	1,070	9.4	0.1	1.03
1974	113,622	101,988	10,391	50	...	...	...	...	...	...	1,130	9.2	0.0	1.03
1975	119,135	107,138	10,771	54	...	...	...	...	...	...	1,193	9.1	0.0	1.07
											1,172	9.0	0.0	

1976	124,512	111,207	11,924	39	1,342	89.3	9.6	0.0	1.1	1.11
1977	129,485	115,733	12,277	54	1,421	89.4	9.5	0.0	1.1	1.14
1978	132,146	118,212	12,355	40	1,539	89.5	9.3	0.0	1.2	1.15
1979	135,250	121,063	12,529	42	1,616	89.5	9.3	0.0	1.2	1.17
1980	141,689	127,379	12,732	46	1,532	89.9	9.0	0.0	1.1	1.22
1981	154,221	139,233	13,333	31	1,624	90.3	8.6	0.0	1.1	1.32
1982	163,980	148,253	13,931	31	1,765	90.4	8.5	0.0	1.1	1.39
1983	179,150	163,607	13,689	54	1,800	91.3	7.6	0.0	1.0	1.51
1984	178,746	163,209	13,617	63	1,857	91.3	7.6	0.0	1.0	1.49
1985	166,640	151,918	12,928	59	1,735	91.2	7.8	0.0	1.0	1.38
1986	166,054	151,079	13,196	50	1,729	91.0	7.9	0.0	1.0	1.37
1987	158,227	143,735	12,830	39	1,623	90.8	8.1	0.0	1.0	1.30
1988	153,600	139,296	12,727	48	1,529	90.7	8.3	0.0	1.0	1.26
1989	157,811	142,612	13,610	51	1,538	90.4	8.6	0.0	1.0	1.29
1990	157,608	142,623	13,317	44	1,624	90.5	8.4	0.0	1.0	1.28
1991	168,969	152,963	14,318	76	1,612	90.5	8.5	0.0	1.0	1.37
1992	179,191	162,654	14,837	72	1,628	90.8	8.3	0.0	0.9	1.45
1993	188,297	170,413	16,131	65	1,688	90.5	8.6	0.0	0.9	1.52
1994	195,106	176,547	16,725	72	1,762	90.5	8.6	0.0	0.9	1.57
1995	199,016	179,844	17,302	66	1,804	90.4	8.7	0.0	0.9	1.60
1996	206,955	187,856	17,228	72	1,799	90.8	8.3	0.0	0.9	1.66
1997	222,635	202,431	18,341	81	1,782	90.9	8.2	0.0	0.8	1.78
1998	243,183	221,761	19,182	76	2,164	91.2	7.9	0.0	0.9	1.94
1999	250,529	229,126	19,291	77	2,035	91.5	7.7	0.0	0.8	2.00
2000	264,246	241,703	20,230	85	2,228	91.5	7.7	0.0	0.8	2.10
2001	285,911	261,631	21,957	81	2,242	91.5	7.7	0.0	0.8	2.27
2002	289,836	264,430	22,846	74	2,486	91.2	7.9	0.0	0.9	2.30
2003	283,854	257,361	23,856	61	2,576	90.7	8.4	0.0	0.9	2.25
2004	270,804	242,680	23,609	152	3,008	90.1	8.7	0.1	1.1	2.14
2005	261,917	233,086	22,906	185	3,245	89.0	8.7	0.1	1.2	2.08
2006	257,475	228,802	22,683	121	3,047	88.9	8.8	0.0	1.2	2.04

(lanjutan)